

**PRO DAN KONTRA PENATAAN WILAYAH PESISIR
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Studi Sosiologis Pada Masyarakat Pesisir Kecamatan Telukbetung Selatan
Kota Bandar Lampung)**

Oleh

AHMAD RIZQI FAJARUDDIN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

ABSTRAK

PRO DAN KONTRA PENATAAN WILAYAH PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG

**(Studi Sosiologis Pada Masyarakat Pesisir Kelurahan Kangkung
Kota Bandar Lampung)**

Oleh

AHMAD RIZQI FAJARUDDIN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di kawasan pesisir dan mengetahui pemahaman masyarakat yang Pro dan Kontra terhadap penataan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung. Kekhawatiran akan adanya relokasi dan hilangnya mata pencaharian menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat pesisir terhadap penataan kawasan pesisir. Di samping itu diperlukan adanya pengelolaan yang baik guna mengoptimalkan potensi kekayaan yang dimiliki kawasan pesisir Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, informan terdiri dari enam orang warga masyarakat pesisir yang terdapat di Kelurahan Kangkung Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pola wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) permasalahan pokok yang menimbulkan Pro dan Kontra penataan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu ; konflik pengelolaan kawasan pesisir, rendahnya penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan pesisir, telah terjadi kemiskinan struktural masyarakat pesisir yang semakin berat, belum adanya usaha-usaha yang terencana dan terpadu untuk memanfaatkan potensi dan keunggulan pesisir Kota Bandar Lampung. (2) Pro dan Kontra dalam penataan kawasan pesisir disebabkan oleh perbedaan pemahaman konsep penataan kawasan pesisir.

Kata Kunci : Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung, Pro dan kontra

Judul Skripsi : PRO DAN KONTRA PENATAAN WILAYAH
PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Sosiologis Pada Masyarakat Pesisir Kecamatan
Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : Ahmad Rizqi Fajaruddin

Program Studi : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Erna Rochana, M.Si
NIP. 19670623 199802 2001

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Susetyo, M.Si
NIP. 19581004 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Rochana, M.Si**

Penguji Utama : **Dewi Ayu Hidayati, S.Sos. M.Si**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian 13 Januari 2012

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Telukbetung, Bandar Lampung pada tanggal 27 Agustus 1985, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara, dari Bapak Drs. Hi. Agus Saiful Islam dan Ibu Heliawati.

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 5 Bumiwaras, Telukbetung pada tahun 1998, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) diselesaikan di SLTPN 18 Bandar Lampung pada tahun 2001, dan Sekolah Menengah Umum (SMU) di selesaikan di SMU YP UNILA Bandar Lampung pada tahun 2004, selanjutnya pada tahun 2005 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di beberapa organisasi eksternal kampus. Pada periode 2008-2009 penulis tercatat sebagai pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Brojonegoro Universitas Lampung. Selain itu, penulis pun aktif dalam Organisasi Kepemudaan GP ANSOR Kota Bandar Lampung sebagai ketua bidang Hubungan Masyarakat pada periode 2007-2011 dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bandar Lampung sebagai Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga periode 2008-2011 serta sebagai Wakil Sekretaris pada periode 2011-2014.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikanku kesempatan berkarya dalam kehidupan. Semoga Ridho-Nya selalu menyertai perjalanan hidupku (*AMIN*)

Shalawat serta salam kepada Rosulullah Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan dalam dunia ini.

Papa dan mamaku tersayang, yang telah sabar mendidik dan membesarkan ku hingga dewasa dan mendapatkan gelar sarjana, semoga ini menjadi baktiku sehingga aku dapat menjadi apa yang papa dan mama harapkan, (*AMIN*).

Termakasih atas do'a dan dukungan papa dan mama.

(Allahummaghfirlli Waliwalidayya Warhamhumaa Kamaa Robbayaanii Shoghiro)

My brother and sister, kalian adalah persamaan darah yang telah memberikan warna dalam hidupku sang inspiratorku kalian adalah teman yang selalu ada di kala suka dan duka. Almarhum cicikku, aku merindukan sosok seorang mbak yang dulu ada, Maaf aku belum bisa membahagiakan papa dan mama.

MOTTO

"Hidup Adalah Soal Keberanian, Menghadapi yang Tanda Tanya"
Tanpa Kita Mengerti, Tanpa Kita Bisa Menawar Terimalah dan Hadapilah

(Soe Hok Gie)

Ketika aku tertidur, aku menyadari betapa banyaknya nikmat dan karunia yang telah diberikan...

Ketika aku bermimpi, aku mempelajari bagaimana menghargai kehidupan dengan segala karunia yang berlimpah...

Dan...

Ketika aku terbangun, aku bersyukur atas segala karunia dan berkah yang telah diberikan dalam kehidupanku...

Terima Kasih Tuhan...

"Tuhan Melihat Manusia Dari Proses Yang Ia Lakukan

Bukan Dari Hasil Yang Ia Dapatkan"

Setiap Langkah Kaki Ditentukan Oleh Sikap Dari Setiap Pijakan!!!

(Ahmad Rizky F.)

SANWACANA

Puja dan puji syukur Penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan akal dan fikiran, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Kutorehkan untaian kalimat dalam skripsiku yang berjudul “*PRO DAN KONTRA PENATAAN WILAYAH PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Sosiologis Pada Masyarakat Pesisir Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung)*” skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang telah sabar mendidik dan membesarkan penulis hingga dewasa dan mendapatkan gelar sarjana;
2. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan FISIP Unila;
3. Bapak Drs. Susetyo, M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi;
4. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si selaku pembimbing utama atas kesediaan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dewi Ayu Hidayati, S.Sos. M.Si, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan positif, terima kasih atas pengertiannya;
6. Bapak Drs. Benyamin, M.Si, selaku dosen yang telah memberikan ide pada proses pengajuan outline skripsi;

7. Ibu Dra. Anita Damayanti, M.H, Selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak membantu memberikan masukan serta pengertiannya;
8. Segenap dosen Jurusan Sosiologi FISIP Unila yang telah menanamkan ilmunya untuk bekalku di dunia luar yang menentukan melakukan pendewasaan diri;
9. Abangku, terima kasih atas bimbingan dan support serta pandangannya semoga dapat menjadi bekalku untuk menatap masa depan;
10. Adikku, yang telah membantu semoga kelak ade sukses dalam hidup;
11. Sepupu-sepupuku, Hapit terima kasih atas bantuannya;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan ku di Kampus tercinta, Nyoman, Wesno, Dwarte, Yuri, Opit, dan Vici. Terima kasih atas persahabatan dan kegilaannya selama ini, sampai bertemu, kita tempuh jalan kita masing-masing Friends...;
13. Teman-teman Sos 2005, Phia, Diah, Yaya, Meli, Hendra, Yusna, Dina, Endah, Erna, Guntur, Dimas, Putri, Ocha, Deka, Melsi Ermay, Jenny (Jeanne), Dika Bek, Yuyun, Melyanti, Mia, Neng Jun, Rhey, Dayat, Acep, Al Kautsar, Ayu... maaf klo ada yang gak disebut;
14. Adik-adik tingkatku yang dalam ranah “HMJ Sosiologi”, Obrin, Deni Alfero, Hendy, Vita dan yang gak gw afal nanya, Terima kasih;
15. Sahabat-sahabatku sjak SD, Firman dan Reza, terima kasih telah menjadi sahabatku sampai sekarang, gak ada matinya;
16. Teman-teman Visitama Muda Media, Idho ‘n Roll, Ali ‘n Roll, Aditya Bagong, Yudi Everyday, Nico Gaul, Nico Ombro, Mamat Casio, kita masih punya mimpi besar;

17. Kakanda-kakanda dan teman-teman pengurus KNPI, GP ANSOR, PMII, Pemuda Pancasila dan OKP lainnya. Bung Fauzan Sibron, SE. Akt, Bang Sudibyo Putra, Bang Om Kemas, Bang Indra Bangsawan, Bang Faisal, Bang Nu'man, Yos, Bang Suhendar, Bang Iwan, Bang Dayat, Bang Agung, Bang Rustam, Haris, David, Tommy, Fikri, Ferryansyah, Ferry Irawan, Rustamaji, Kemal Dinata RSZP, Ochi, Dimas, Idhi, Najib, Aryo, Reza Bagong, Edo, dan Redo. Terima kasih telah berbagi pengalaman, semoga ini berguna untuk masa depan ku.

Akhir kata sebagai penulis, aku menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua (*AMIN*).

Bandar Lampung, Januari 2012
Penulis

Ahmad Rizqi Fajaruddin

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xiv
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pro dan Kontra	9
B. Tata Ruang	9
1. Dasar Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah	12
2. Azas Penataan Ruang	13
3. Tujuan Penataan Ruang	14
4. Tujuan dan Sasaran RTRW Kota Bandar Lampung	14
5. Komponen Penataan Ruang	15
6. Klasifikasi Penataan Ruang	16
C. Wilayah Pesisir	16
1. Potensi Kawasan Pesisir	18
2. Permasalahan Kawasan Pesisir	20

3. Pengelolaan Kawasan Pesisir	23
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung .	26
D. Pembangunan	29
E. Kerangka Pikir	34
F. Skema Kerangka Pikir	37
III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Fokus Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Penentuan Informan	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Wawancara Mendalam	40
2. Observasi Lapangan	41
3. Dokumentasi	41
F. Sumber Data	41
1. Data Primer	42
2. Data Skunder	42
G. Teknik Analisis Data	42
1. Reduksi Data	42
2. Penyajian Data	43
3. Verifikasi	43
IV GAMBARAN UMUM	45
A. Letak Geografis	45
B. Sosial Ekonomi	46

V PEMBAHASAN	50
A. Kawasan Pesisir	50
B. Permasalahan Kawasan Pesisir	56
C. Tata Ruang	58
D. Pro dan Kontra Masyarakat Terhadap Penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung	62
1. Masyarakat yang Pro Terhadap Penataan Wilayah Pesisir	62
2. Masyarakat yang Kontra Terhadap Penataan Wilayah Pesisir .	64
VI KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

	Halaman	
1.	Data Demografi Kecamatan Telukbetung Selatan	46
2.	Data Penduduk Wilayah Pesisir	47
3.	Data Penduduk Menurut Pekerjaan	48
4.	Permasalahan Masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung	57
5.	Fungsi Tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Bandar Lampung	61

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Wilayah Pesisir berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, " Wilayah Pesisir ialah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat Wilayah Pesisir meliputi baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut mencakup bagian laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran".

Wilayah Pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumberdaya laut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Kekayaan sumberdaya pesisir, meliputi pulau-pulau besar dan kecil, yang dikelilingi ekosistem pesisir tropis, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, berikut sumberdaya hayati dan non-hayati yang terkandung di dalamnya.

Namun, karakteristik laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan secara terpadu. Kebijakan pemerintah yang sektoral dan masih berorientasi daratan, akhirnya menjadikan laut sebagai kolam sampah raksasa.

Beberapa peranan dari Wilayah Pesisir, yaitu bahwa Wilayah Pesisir merupakan tempat bertemunya pendatang dari berbagai daerah, Wilayah Pesisir menjadi mozaik sosial dan budaya, Ekosistem yang paling beragam, rumit dan produktif sebagian besar terletak di Wilayah Pesisir. Sangat penting peranannya dalam menjamin pengadaan pangan dunia, menumbuhkan dan menjaga keunikan sosial, budaya dan ekologi serta negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang memiliki sumberdaya yang sangat terbatas merupakan contoh dari cara hidup dalam lingkungan yang terbatas tetapi terbuka terhadap globalisasi. (<http://bandarlampungkota.go.id>)

Salah satu wilayah yang memiliki potensi area pesisir yang cukup baik adalah area pesisir Bandar Lampung dimana Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung memiliki luas sekitar 0,05% atau sekitar 27 km dari luas keseluruhan Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung berada pada Teluk Lampung, selatan Pulau Sumatera. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5° 20' - 5° 30' Lintang Selatan dan 105° 28' - 105° 37' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Bandar Lampung adalah 192,18 km² dengan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah 790.895 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 41 jiwa/km². (<http://bandarlampungkota.go.id>)

Cakupan lokasi yang menjadi objek penataan pesisir dibatasi pada kelurahan-kelurahan yang termasuk Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung, terdiri dari dua belas Kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Panjang, Telukbetung Selatan dan Telukbetung Barat. Kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Panjang adalah: Srengsem, Panjang Selatan, Panjang Utara, dan Karang Maritim. Kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Telukbetung Selatan adalah: Pesawahan, Kangkung, Bumiwaras, Way Lunik, dan Sukaraja. Sedangkan kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Telukbetung Barat adalah: Sukamaju, Keteguhan dan Kota Karang. (<http://bandarlampungkota.go.id>)

Pesatnya pertumbuhan penduduk seiring dengan perkembangan pembangunan secara langsung akan mempengaruhi kondisi dan keadaan Wilayah Pesisir. Apabila pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan tersebut tidak memperhatikan tataruang kota serta adanya pengelolaan lingkungan yang lemah, maka dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti munculnya *Slum Areas* (daerah kumuh), yang ditunjukkan dengan buruknya keadaan lingkungan, kurangnya fasilitas sosial dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya.

Selain itu pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai jumlah terbesar merupakan kelompok profesi paling miskin di Indonesia. Sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat pesisir yang berdampak pada pandangan masyarakat terhadap penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung.

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Yang berdampak pada pemanfaatan Wilayah Pesisir yang cenderung kurang terarah.

Pratikto (2005) mengemukakan fenomena yang terjadi pada masyarakat pesisir disebabkan oleh tiga hal yaitu;

- a) Kemiskinan struktural, berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor luar (ekternal) seperti sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan insentif, fasilitas pembangunan dan teknologi;
- b) Kemiskinan super-struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan makro yang tidak pro pembangunan masyarakat pesisir seperti kebijakan pemerintahan yang berupa proyek dan program pembangunan;
- c) Kemiskinan kultural, merupakan kemiskinan yang berkaitan dengan keadaan yang melekat pada masyarakat pesisir seperti gaya hidup, tingkat pendidikan, budaya, adat, serta kepercayaan.

Oleh karena itu guna mengatasi permasalahan yang terjadi di Wilayah Pesisir diperlukan adanya penataan Wilayah Pesisir yang terencana guna memaksimalkan potensi kekayaan pesisir demi kesejahteraan masyarakat dan keselarasan lingkungan. Peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan guna terwujudnya pengelolaan pesisir yang lebih terencana.

Penataan Wilayah Pesisir merupakan suatu upaya perubahan yang dilandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah). Interpretasi Marx dan Engels mengemukakan bahwa perubahan harus dicari dalam aspek ekonomi ketimbang didalam filsafat. Pemahaman historis hanya diperoleh melalui analisis struktural. Upaya untuk memperoleh pemahaman dalam mempelajari pemikiran-pemikiran manusia akan selalu menghasilkan kegagalan.

Bukan cara manusia berfikir, juga bukan apa yang dipikirkan manusia dalam membentuk sejarah, cara mereka berhubungan dalam proses produksi dan cara hubungan mereka dengan produksilah yang membentuk sejarah.

Setiap masyarakat ditandai oleh suatu infrastruktur yaitu struktur ekonomi, dan suprastruktur yang terdiri dari ideologi, hukum, pemerintahan, keluarga, dan agama. Suprastruktur muncul dari infrastruktur, artinya basis materil (ekonomi) masyarakat adalah landasan tempat membangun semua basis kehidupan lainnya, dengan demikian perubahan cara produksi menyebabkan perubahan di dalam seluruh hubungan (Lauer, 2003).

Apabila kita melihat tujuan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015 adalah :

“Untuk menciptakan tata ruang kawasan perkotaan dalam suatu blok-blok peruntukkan (*Blicking system*) melalui perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan ditinjau dari aspek fungsional, social, ekonomi dan lingkungan termasuk ekologi dan visualnya”.

Penataan Wilayah Pesisir Bandar Lampung secara langsung akan berdampak kepada keberadaan masyarakat yang berada di Wilayah Pesisir. Adapun pengelolaan dampak sosial tersebut, antara lain:

- a) Mengelola dampak sosial negatif/positif, yang diprediksi terjadi pada saat/setelah penataan ruang pesisir;
- b) Sebagai bagian dari *social safeguard* (pengamanan sosial);
- c) Melakukan langkah-langkah kongkrit dan skenario kebijakan sosial ekonomi yang berpihak pada masyarakat;

- d) Menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat;
- e) Mengembangkan potensi sosial ekonomi yang tumbuh di masyarakat;
- f) Melakukan pendekatan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung.

Dengan melihat proses pengelolaan Wilayah Pesisir selama ini yang menimbulkan berbagai macam permasalahan pada masyarakat pesisir, maka permasalahan yang menjadi penting dalam penelitian ini ialah proses pengelolaan lingkungan membutuhkan suatu adanya perencanaan yang terpadu serta pada proses tersebut akan muncul berbagai kriteria-kriteria yang diharapkan akan mengoptimalkan potensi yang terkandung pada Wilayah Pesisir sehingga masyarakat pesisir dapat menikmati kekayaan yang terkandung di Wilayah Pesisir. Proses pengelolaan tersebut tentu merujuk pada adanya suatu perencanaan penataan ruang pada Wilayah Pesisir dan sejauh mana masyarakat pesisir memahami potensi yang terkandung dalam Wilayah Pesisir.

Guna menghindari adanya Pro dan Kontra yang terjadi akibat dari konsekuensi pembangunan, secara konkret dalam Undang-undang No.25 tahun 1994 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan surat edaran Mendagri No.50/1987/tertanggal 5 Mei 2003 tentang pedoman penyelenggaraan koordinasi pembangunan partisipatif, memberikan amanat kepada seluruh pemerintah daerah untuk melaksanakan pola pembangunan partisipatif. Pelaksanaan pembangunan partisipatif diharapkan dapat mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat tentang kepentingan dan kebutuhan mereka dalam program pembangunan daerah.

Pemikiran inilah yang turut mendukung penulis memilih masyarakat pesisir sebagai bagian dari obyek penelitian ini. Mengingat kompleksnya masalah yang terjadi di Wilayah Pesisir Bandar Lampung, maka permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini di fokuskan pada permasalahan yang terjadi di Wilayah Pesisir Bandar Lampung sehingga diperlukan adanya solusi/upaya bersama dalam mengoptimalkan potensi Wilayah Pesisir Bandar Lampung.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana permasalahan yang terjadi di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana persepsi masyarakat yang Pro dan Kontra terhadap penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung;
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat yang Pro dan Kontra terhadap penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan:

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada mata kuliah Sosiologi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah;
2. Secara akademis nantinya dijadikan bahan pertimbangan bagi proses penelitian selanjutnya;
3. Secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk menangani masalah pembangunan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pro dan Kontra

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1954), pro diartikan sebagai pernyataan setuju. Sedangkan kontra diartikan menentang atau tidak menyetujui.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pro dan Kontra dalam pandangan penulis merupakan pernyataan setuju dan tidak menyetujui yang terjadi akibat adanya pemahaman yang berbeda satu dengan lainnya.

B. Tata Ruang

Secara umum penataan ruang dipahami sebagai upaya mengatur ruang wilayah agar teratur, layak, pantas dan nyaman sebagai tempat bermukim dan beraktifitas bagi masyarakat melalui penempatan aktifitas sesuai peruntukan lahan yang telah ditetapkan dalam sebuah desain tata ruang yang melibatkan masyarakat dan semua kelompok kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. (Dadang Sudardja, 2005)

Sedangkan tata ruang menurut Erna Witoelar (2007) adalah kegiatan penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal.

Menurut Erna Witoelar (2007) strategi pendayagunaan penataan ruang haruslah disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Diperlukan keterpaduan program, yang tidak hanya lintas sektoral tetapi juga lintas wilayah dengan kerangka pengembangan wilayah atau kawasan.
- b. Pendekatan bottom-up atau mengedepankan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Mensinergikan pembangunan dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal dalam rangka NKRI.
- d. Menyusun prioritas dalam pelaksanaan program.
- e. Akomodatif terhadap berbagai masukan, kemitraan dengan seluruh stakeholder dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.
- f. Mengupayakan pelaksanaan pembangunan yang konsisten terhadap rencana tata ruang.
- g. Penegakkan hukum yang konsisten dan konsekuen.
- h. Pembagian peran yang “seimbang” (tidak harus sama) antar seluruh pelaku penataan ruang.
- i. Melakukan kerja sama antar wilayah untuk menciptakan sinergi pembangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Menurut Djoko Sujarto dalam (Dadang Sudardja, 2005) masalah penataan ruang berkaitan dengan empat hal pokok yaitu :

1. Permasalahan yang multi kompleks;
2. Adanya keterkaitan berbagai isu pembangunan kota;
3. Berbagai macam dan lingkup kepentingan yang harus ditampung dalam perencanaan kota;
4. Cara pengambilan keputusan yang dapat memberikan kepuasan bagi berbagai pihak di dalam rangka mengemukakan usulan-usulannya yang akan digariskan dalam rencana kota.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tata ruang merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang dapat mensejahterakan masyarakat.

1. Dasar Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah

Dasar hukum penyusunan RTRW kota berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan, serta landasan hukum penyusunan RTRW.

a) Aspek hukum dan kelembagaann dari RTRW mencakup :

1) Kewenangan untuk penataan ruang wilayah kota terdapat pada Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Walaupun kegiatan penataan wilayah kota berada dalam wewenang pemerintah kota, tetapi proses penyusunan rencana tata ruang tetap harus memperhatikan kewenangan sektor yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang telah dijamin oleh Undang-undang.

2) Bentuk Hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Batasan pengertian ruang lingkup dari Perencanaan Tata Ruang di Wilayah kota yang dititikberatkan pada arah lokasi pemanfaatan ruang maka, bentuk hukum dari rencana tata ruang wilayah disesuaikan pada kewenangan kota yang bersifat Peraturan daerah (Perda).

b) Landasan Hukum Penyusunan RTRW

1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah;

3) Undang-undang nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
Pasal 7 Ayat 2;

Penataan Ruang berdasarkan administrative meliputi ruang wilayah nasional, wilayah provinsi daerah tingkat I dan wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
- 5) Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327 Tahun 2002 tentang pedoman penyusunan RTRW;
- 6) Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 137 Tahun 1998 tentang pedoman penyusunan RTRW provinsi dan kabupaten/kota;
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang tata ruang wilayah;
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang wilayah.

(Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2003)

2. Azas Penataan Ruang

- 1) Keterpaduan;
- 2) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- 3) Keberlanjutan;
- 4) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- 5) Keterbukaan;
- 6) Kebersamaan dan kemitraan;
- 7) Perlindungan kepentingan umum;
- 8) Kepastian hukum dan keadilan; dan
- 9) Akuntabilitas.

(Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2003)

3. Tujuan Penataan Ruang

Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. (Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2003)

4. Tujuan dan Sasaran RTRW Kota Bandar Lampung

Tujuan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung adalah untuk menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan, sebagai penjabaran kegiatan kedalam wujud ruang dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan utama dari kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Serta menjadi acuan pemerintah kota dalam memberikan perizinan dan pemanfaatan serta pengendalian ruang pada wilayah tersebut.

Adapun sasaran yang ingin dicapai di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan rencana struktur tata ruang kota atau rencana bagian wilayah kota (BWK) serta menegaskan fungsi-fungsi utama kota dan sistem hubungan antara fungsi-fungsi tersebut;
- 2) Menetapkan rencana penyebaran kepadatan penduduk;
- 3) Memantapkan rencana penggunaan lahan kota dengan memperhatikan unsur-unsur desain kota;
- 4) Menetapkan rencana sistem transportasi dan utilitas kota;
- 5) Memantapkan aspek kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang kota;
- 6) Memantapkan rencana indikasi program pembangunan.

(Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2003)

5. Komponen Penataan Ruang

Struktur ruang pada hakikatnya merupakan hasil dari suatu proses yang mengalokasikan objek-objek fisik dan aktifitas kesatuan kawasan disuatu wilayah. Wawasan sistem tata ruang ini berdasarkan pada kerangka konseptual yang diformulasikan. Pertama, proses yang mengalokasikan aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan hubungan fungsional tertentu. Kedua, proses pengadaan atau ketersediaan fisik yang menjawab kebutuhan akan ruang bagi aktivitas seperti tempat bekerja, tempat tinggal, transportasi dan komunikasi. (Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2003.)

6. Klasifikasi Penataan Ruang

- 1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan;
- 2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- 3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- 4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan;
- 5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

(Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2003)

C. Wilayah Pesisir

Wilayah Pesisir dari pendekatan ekologis adalah daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat laut seperti angin laut, pasang surut dan intrusi air laut; sedangkan batas ke arah laut mencakup bagian perairan pantai sampai batas terluar dari paparan benua yang masih dipengaruhi oleh proses alamiah yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar serta proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya penggundulan hutan,

pencemaran industri/domestik, limbah tambak, atau penangkapan ikan. Jika dilihat dari pendekatan administrasi, Wilayah Pesisir adalah kawasan yang secara administrasi pemerintahan mempunyai batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten atau kota dan ke arah laut sejauh 12 mil dari garis pantai untuk provinsi atau sepertiganya untuk kabupaten atau kota (Dahuri, et.al., 2004).

Menurut, Soegiarto (1976), definisi Wilayah Pesisir yang sering dipergunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat Wilayah Pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Pengertian Wilayah Pesisir berdasarkan UU No.27 Tahun 2007, yaitu "Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Kearah darat Wilayah Pesisir meliputi baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut mencakup bagian laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran".

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Wilayah Pesisir mempunyai dua karakteristik, yaitu sebagai wilayah pertemuan antara darat dan

laut sebagai tempat beragam ekosistem yang saling berinteraksi sehingga memungkinkan dapat diakses dengan mudah oleh aktivitas manusia. Masyarakat yang tinggal pada Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil disebut masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir dimaksud adalah nelayan dan masyarakat pesisir lainnya yang menggantungkan kehidupannya dari sumber daya yang terkandung di Wilayah Pesisir.

1. Potensi Wilayah Pesisir

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1954), potensi diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Oleh karena itu Wilayah Pesisir memiliki kekayaan sumberdaya alam dan manusia yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, maka potensi pesisir dapat diartikan sebagai segala sumberdaya alam dan manusia pesisir yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bagi kesejahteraan hidup masyarakat pesisir. Pembangunan dimaksud dapat dilakukan melalui suatu proses pembangunan yang memanfaatkan segala potensi pesisir.

Potensi pembangunan yang terdapat di Wilayah Pesisir menurut Dahuri, et al. (2004) terdiri dari tiga kelompok : (1) sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*), seperti hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, dan sumberdaya perikanan laut. (2) sumberdaya tak dapat pulih (*non-renewable resources*), seperti mineral dan geologi. (3) jasa-jasa lingkungan (*environmental services*), seperti pariwisata, media transportasi, pertahanan keamanan, sistem penunjang kehidupan serta fungsi fisiologis lainnya.

Rudyanto, 2004 dalam (Amir Mahmud, 2007) menegaskan tentang kondisi sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat milik bersama (*common property*) dengan akses yang bersifat terbuka. Istilah *common property* lebih mengarah pada kepemilikan yang berada di bawah kontrol pemerintah atau lebih mengarah pada sifat sumberdaya yang merupakan daerah umum. sehingga sifat sumberdaya tersebut bukanlah tidak ada pemiliknya. Ini berarti sumberdaya tersebut tidak terdefiniskan dalam hal kepemilikannya sehingga menimbulkan gejala yang disebut dengan *dissipated resource rent*, yaitu hilangnya rente sumberdaya yang semestinya diperoleh dari pengelolaan yang optimal. Dengan adanya sifat sumberdaya yang terbuka menyebabkan tindakan salah satu pihak yang merugikan pihak lain tidak dapat terkoreksi oleh pasar (*market failure*). Hal ini menimbulkan ketidak efisienan ekonomi karena semua pihak akan berusaha mengeksploitasi sumberdaya sebesar-besarnya, jika tidak maka pihak lain yang akan mendapat keuntungan.

Menurut Wiyana dalam (Amir Mahmud, 2007) Interaksi faktor-faktor yang berkaitan didalam sistem perairan pesisir dapat dilihat dari faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pengelolaan pesisir terpadu, yaitu: (1) tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir; (2) Proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, transparan, akuntabel, dan didukung dengan informasi ilmiah sebagai prasarat untuk menciptakan parameter berkelanjutan pengelolaan pesisir terpadu; (3) Proses penutupan proyek secara tepat; (4) Kerangka hukum yang memadai; dan (5) Desain proyek yang fleksibel yang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan pesisir terpadu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Wilayah Pesisir memiliki potensi kekayaan sumberdaya yang melimpah oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan yang efisien guna mengoptimalkan potensi sumberdaya yang terkandung di Wilayah Pesisir. Keterpaduan perlindungan dan pengelolaan Wilayah Pesisir memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya di dalamnya dan merupakan objek pengelolaan.

2. Permasalahan Wilayah Pesisir

Sebagian besar Wilayah Pesisir merupakan lingkungan permukiman nelayan yang pada umumnya merupakan kawasan kumuh dengan tingkat pelayanan akan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang sangat terbatas, khususnya keterbatasan untuk memperoleh pelayanan sarana air bersih, drainase dan sanitasi.

Tarik menarik kepentingan dan tolak menolak tanggung jawab terhadap Wilayah Pesisir sebagai kawasan yang merupakan bagian dari daerah yang menjadi batas antara wilayah laut dengan daratan ini memiliki permasalahan yang sangat kompleks. Berbagai isu dan permasalahan memerlukan penanganan yang komprehensif dengan strategi khusus dan terpadu. Terdapat berbagai permasalahan yang terdapat di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu :

1. Konflik pengelolaan Wilayah Pesisir;
2. Rendahnya penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan Wilayah Pesisir;
3. Telah terjadi kemiskinan struktural masyarakat pesisir yang semakin berat;

4. Belum adanya usaha-usaha yang terencana dan terpadu untuk memanfaatkan potensi dan keunggulan pesisir Kota Bandar Lampung.

Guna menangani permasalahan yang terdapat di Wilayah Pesisir diperlukan adanya suatu strategi pengelolaan Wilayah Pesisir. Strategi yang mengacu kepada visi pengelolaan pesisir terpadu yaitu terwujudnya pengelolaan sumberdaya Wilayah Pesisir yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang didukung oleh peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan dan penegakan hukum, serta penataan ruang untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat (Cicin-Sain and Knecht, 1998).

Menurut Herry Darwanto dan Dwiagus Stepantoro dalam (Amir Mahmud, 2007) ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan, adalah:

- Adanya perbedaan kepentingan yang cenderung menjurus ke konflik kepentingan antar sektoral dan stakeholder lainnya. Konflik kepentingan ini tidak hanya terjadi antar sektoral dalam pemerintahan tetapi juga dengan masyarakat setempat dan pihak swasta.
- Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan sumber daya pesisir dan lautan, serta perangkat hukum untuk penegakannya menyebabkan masih banyaknya pemanfaatan sumberdaya ini yang tidak terkendali. Juga tidak adanya kekuatan hukum dan pengakuan terhadap sistem-sistem tradisional serta wilayah ulayat laut dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.

- Masih minimnya keikutsertaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Tidak mengherankan apabila masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki terhadap pesisir dan lautan yang lestari serta pemahaman tentang pentingnya nilai ekonomis dan non-ekonomis dari keberadaan pesisir dan lautan yang perlu dijaga.

Lemahnya kerangka hukum dan peraturan terhadap pengelolaan Wilayah Pesisir serta masih minimnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir mengakibatkan kompleksnya permasalahan yang terdapat di Wilayah Pesisir. Sehingga berakibat terhambatnya pembangunan guna mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir. Menurut Amir Mahmud (2007) pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan tanpa menerapkan konsep keberlanjutan (*sustainable*) dan keterpaduan (*integrated*), dapat dipastikan lingkungan pesisir dan lautan akan mengalami kerusakan (*degradasi*). Akibatnya lingkungan pesisir dan lautan mengalami penurunan fungsi dimensi ekologis yang dimiliki sebagai: 1) penyedia sumberdaya (*resources supplier*), 2) penyedia kebutuhan pendukung kehidupan (*life support*), 3) penyedia jasa-jasa kenyamanan (*amenities*) dan 4) penampung limbah.

Penurunan fungsi dimensi ekologis yang dimiliki lingkungan pesisir dan lautan, secara umum disebabkan oleh 2 hal, yaitu: 1) kegiatan manusia dan 2) bencana alam. Degradasi lingkungan yang umum terjadi, banyak disebabkan oleh kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumberdaya ataupun kawasan di lingkungan pesisir dan lautan,

tanpa memperhatikan kemampuan sumberdaya untuk pulih (*carrying capacity*), karakteristik lingkungan dan kondisi *oceanografi* di lingkungan pesisir dan lautan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Wilayah Pesisir memiliki bermacam-macam permasalahan yang cukup kompleks akibat adanya pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir yang kurang baik. Sehingga berdampak pada rusaknya kelestarian lingkungan yang memiliki potensi kekayaan sumberdaya yang melimpah.

3. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Oleh sebab itu, keunikan Wilayah Pesisir yang rentan, berkembangnya konflik, dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia bisa dikendalikan dan sebagian Wilayah Pesisir dipertahan untuk konservasi.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 Ayat (4) disebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan

untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Dengan demikian kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
2. Pengaturan administratif;
3. Pengaturan tentang tata ruang;
4. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
5. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;
6. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dilaksanakan secara terpadu dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terpilah-pilah menjadi suatu sistem yang serasi dan saling menguntungkan, sehingga kegiatan masing-masing sektor dapat saling mengisi dan mendukung, serta komplemen dengan kegiatan pembangunan daerah dan masyarakat pesisir.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang tidak memenuhi kaidah-kaidah pembangunan yang berkelanjutan secara signifikan mempengaruhi ekosistemnya. Kegiatan pembangunan yang ada di kawasan ini akan dapat mempengaruhi produktivitas sumberdaya akibat proses produksi dan residu, dimana pemanfaatan yang berbeda dari sumberdaya pesisir kerap menimbulkan konflik yang dapat berdampak timbal balik. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk tujuan pembangunan nasional akan dapat berhasil jika dikelola secara terpadu.

Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu adalah suatu proses interaktif dan evolusioner untuk mewujudkan pembangunan Wilayah Pesisir secara optimal dan berkelanjutan.

Karakteristik umum dari wilayah laut dan pesisir dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Laut merupakan sumber dari “*common property resources*” (sumber daya milik bersama), sehingga kawasan memiliki fungsi publik/kepentingan umum;
- b. Laut merupakan “*open access regime*”, memungkinkan siapa pun untuk memanfaatkan ruang untuk berbagai kepentingan;
- c. Laut bersifat “*fluida*”, dimana sumber daya (biota laut) dan dinamika *hydro-oceanography* tidak dapat disekat/dikapling;
- d. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “*prasarana*” pergerakan);
- e. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

(Setia Budhy Algamar, 2003)

Di dalam proses pengelolaan dilakukan identifikasi dan analisis mengenai berbagai isu pengelolaan atau pemanfaatan yang ada maupun yang diperkirakan akan muncul dan kemudian menyusun serta melaksanakan kebijakan dan program

aksi untuk mengatasi isu yang berkembang. Proses pengelolaan Wilayah Pesisir menurut Cicin-Sain dan Knecht (1998) terdapat empat tahapan utama, yaitu :

- (1) Penataan dan perencanaan;
- (2) Formulasi;
- (3) Implementasi, dan;
- (4) Evaluasi.

Pada tahap perencanaan dilakukan pengumpulan dan analisis data guna mengidentifikasi kendala dan permasalahan, potensi dan peluang pembangunan dan tantangan. Atas dasar ini, kemudian ditetapkan tujuan dan target pengelolaan atau pemanfaatan dan kebijakan serta strategi dan pemilihan struktur implementasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan Wilayah Pesisir diperlukan adanya suatu perencanaan guna mengidentifikasi kendala dan permasalahan dalam pemanfaatan serta pelastarian Wilayah Pesisir, sehingga dapat mengakomodir pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan Kawasan Pesisir.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung

Secara lebih rinci, fungsi penataan ruang pemerintah daerah kabupaten/kota adalah menyusun arahan, tujuan dan kebijakan penataan ruang; merumuskan struktur dan proses-proses penataan ruang; menentukan peraturan hukum mengenai produk dan proses penataan ruang; mengkaji dan mengesahkan rencana

tata ruang kawasan-kawasan; membuat sistem implementasi rencana tata ruang; dan membentuk dukungan informasi untuk penataan ruang yang dilakukan oleh masyarakat maupun institusi pemerintah.

Materi kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi antara lain: kerangka sistem perencanaan; prinsip, tujuan, kebijakan strategis; panduan penataan ruang kabupaten/kota; institusi, program dan prosedur untuk menyiapkan dan melaksanakan rencana tata ruang dan kebijakan penataan ruang; peraturan, ketentuan dan standar pengelolaan SDA; strategi sektoral penataan ruang (seperti kawasan lindung, hutan, pertambangan); dan indikator untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan penataan ruang.

Menurut Kepres No.32 Tahun 1990 kawasan 100 meter dari pasang tertinggi merupakan kawasan sempadan pantai yang perlu dilindungi. Kawasan Pantai Bandar Lampung memiliki permasalahan yang rumit, mengingat kawasan tersebut lahannya telah menjadi hak milik dan aktifitas kegiatan di sepanjang pantai telah menutupi pantai sebagai ruang publik. Untuk mengembalikan fungsi pantai dengan fungsi lindungnya sebagai sempadan pantai dan ruang publik diperlukan upaya reklamasi pantai yang berwawasan lingkungan.

Terdapat beberapa hal yang mendasari pengambilan keputusan untuk dilakukan reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung berdasarkan RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2003, yaitu:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak memiliki lahan yang memadai untuk digunakan *mengenerate* pembangunan kota khususnya dikawasan pantai Kota Bandar Lampung;
2. Pada kenyataannya lahan-lahan di sepanjang kawasan pantai sepanjang 16 km adalah tanah hak milik beberapa orang saja, dimana berdasarkan UU Agraria, kepemilikan hak atas tanah bersifat mutlak sehingga sulit bagi pihak pemda untuk mengatur dan menata kawasan pantai sesuai dengan rencana yang disusun, terlebih pihak Pemkot tidak memiliki dana untuk dapat membebaskan lahan sepanjang pantai;
3. Kawasan pantai merupakan kawasan yang sesungguhnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi bagi pengembangan kegiatan khususnya bagi perdagangan, jasa, pariwisata maupun pemukiman sehingga diperlukan upaya-upaya penataan kawasan pantai guna memanfaatkan potensi yang dimiliki tersebut.
4. Fungsi utama yang dikembangkan adalah sebagai kota perdagangan dan jasa. Sektor yang dikembangkan untuk menunjang fungsi tersebut adalah transportasi, perdagangan jasa, pariwisata, pendidikan tinggi dan industry manufaktur.

(Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2003)

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan Wilayah Pesisir, laut dan pulau kecil menjangkau wilayah laut sampai sejauh sepertiga dari batas kewenangan provinsi (sepertiga dari 12 mil).

Dalam penataan ruang Wilayah Pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, yang perlu dicakup adalah tujuan, sasaran, kebijakan; program pengelolaan, strategi utama pengelolaan wilayah, prinsip kerja sama dengan pemda yang lebih rendah, dan proses perumusan rencana tata ruang kawasan dan cakupannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini, sebagaimana juga rencana tata ruang wilayah nasional dan provinsi, tidak harus memuat peta yang menunjukkan lokasi persisnya elemen-elemen rencana tata ruang.

Rencana tata ruang Wilayah Pesisir, laut dan pulau-pulau kecil baru perlu disusun untuk skala kawasan, yaitu wilayah di dalam daerah kabupaten atau kota. Rencana tata ruang Wilayah Pesisir, laut dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari rencana pengembangan kawasan yang lebih luas yang meliputi rencana tata ruang kawasan darat, rencana transportasi, rencana prasarana, rencana perumahan, dll. Cakupan rencana tata ruang Wilayah Pesisir, laut dan pulau-pulau kecil mengandung uraian mengenai tujuan, sasaran, kebijakan dan batasan lokasi kawasan-kawasan yang lebih mikro. Penentuan kawasan ini perlu didasarkan atas suatu riset terlebih dahulu.

D. Pembangunan

Pembangunan menurut Mirsa (Tjokroamidjojo, 1996 :9) adalah sebagai upaya sadar dan melembaga sehingga pembangunan tidak boleh tidak akan bermuatan nilai, yang artinya pembangunan ingin mewujudkan tipe masyarakat yang lebih baik di dalam citra suatu bangsa. Dengan tujuan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik sebagaimana didefinisikan oleh negara.

Kartasasmita (Riyadi, 2005 : 4) memberikan definisi yang sederhana, yaitu pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Kemudian, Siagian (Riyadi,2005 : 4) pembangunana merupakan sebagai suatu usaha dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa (*National Building*).

Siagian dalam administrasi pembangunana (1974) mendefinisikan pembangunan sebagai usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju moderanitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*). Pembangunan bangsa lebih ditujukan pada upaya pemantapan dan peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa, wawasan tdeologi, dan mencagah berbagai perpecahan, konflik, dan sebagainya antara suku, antaragama, antar daerah, dan antar kelompok kepentingan.

Sutanto (1984 : 16) bahwa tujuan pembangunan adalah suatu kegiatan sosial yang mencakup ; a) Perbaikan hidup dan tingkat pendapatan masyarakat, b) mengadakan sarana untuk apa yang dituju, c) pengaduan atau perubahan struktur sosial lama sebagai akibat kemajuan.

Pembangunan dapat disimpulkan bahwa suatu usaha yang dilaksanakan secara terus-menerus dalam masyarakat untuk mendapatkan suatu perubahan dari keadaan yang belum baik untuk berubah ke kondisi yang diharapkan. Pengertian pembangunan tersebut terkandung makna adanya sebuah usaha untuk

mengembangkan, memperbaharui, mengganti yang kurang baik menjadi baik lagi dengan terencana.

Usaha pembangunan pada hakekatnya adalah merupakan proses panjang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap pembangunan tersebut. dalam pembangunan, rakyat adalah objek sekaligus menjadi subjek dan sasaran, yang pada saat ini merupakan unsur yang sangat dominan dalam keikutsertaannya untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan upaya pembangunan yang dilaksanakan. Pentingnya partisipasi masyarakat sehingga perlu dipahami berbagai konsep dan teori partisipatif sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Alexander Abe (2005), dan juga menurut banyak pihak partisipasi merupakan jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan daerah dapat dilakukan dengan model pembangunan partisipatif yang sering disebut pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang bertujuan melibatkan kepentingan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Usaha-usaha penerapan pendekatan partisipatif telah memunculkan berbagai persepsi dan interpretasi yang berbeda-beda tentang partisipatif. Persepsi dan interpretasi yang berkembang selama ini bahwa:

- a) Masyarakat bertanggungjawab untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- b) Anggota masyarakat ikut menghadiri pertemuan-pertemuan perencanaan, pelaksanaan, pengkajian ulang proyek, namun kehadiran mereka terbatas sebagai pendengar semata;
- c) Anggota masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan tentang cara melaksanakan proyek dan ikut menyediakan bantuan serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proyek tersebut;
- d) Anggota masyarakat berpartisipasi aktif dalam semua tahap pengambilan keputusan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebuah program.

(Sumber : *www.goodgovernance.or.id*)

Davis (Susanto, 2005:18) terdapat tiga gagasan penting partisipasi, yaitu:

1. Bahwa partisipatif sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata hanya keterlibatan jasmaniah;
2. Partisipatif adalah kesediaan memberikan suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, hal ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok karena nilai yang dibawa kelompok tersebut;
3. Unsur ke tiga adalah tanggung jawab, yaitu segi yang menonjol dari rasa sebagai anggota (*sense of belonging*)

Sastrosapetro (1988:51-52) beberapa faktor yang mengungkap definisi partisipatif sebagai berikut :

1. Gordon "*The Psychology of Participation*" yaitu, keterlibatan ego atau diri sendiri/pribadi/personalitas secara kewajiban lebih dari pada jasmani atau fisik saja;
2. Alastairwhite "*Introduction to Community Participation*" yaitu, keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan;
3. Sastrosapetro, *WHO Short Course*, partisipatif adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Pembangunan partisipatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat pesisir secara utuh dalam pelaksanaan penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung. Sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara terencana dan terarah guna terwujudnya kepentingan bersama.

a. Prinsip-prinsip Partisipasi

Tujuan jangka panjang pendekatan partisipatif adalah meningkatkan kemampuan atau pemberdayaan setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah proyek atau program, dengan cara melibatkan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, serta proses evaluasi pembangunan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip partisipasi :

- Cakupan, semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil suatu keputusan dari sebuah program pembangunan;
- Kesetaraan dan Kemitraan (*equal partnership*)
- Transparasi
- Kesetaraan Kewenangan (*equal powership*)
- Kesetaraan Tanggung Jawab (*equal responsibility*)
- Pemberdayaan (*empowerment*)
- Kerjasama.

b. Manfaat Pendekatan Partisipasi

Dampak pendekatan partisipatif adalah sebagai berikut :

- Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif dalam konteks sosial, ekonomi dan budaya yang sudah ada sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab diantara pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, sehingga pelaksanaan dan dampak pembangunan itu menjadi berkesinambungan;
- Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggung jawaban keputusan sehingga memperdayakan semua pihak yang terlibat. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat;
- Transparasi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi dan wewenang;

- Pelaksanaan program lebih terfokus terhadap kebutuhan masyarakat.

(Sumber : *www.goodgovernance.or.id*)

E. Kerangka Pikir

Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung memiliki luas sekitar 0,05% atau sekitar 27 km dari luas keseluruhan Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung berada pada Teluk Lampung, selatan Pulau Sumatera. Letak geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5° 20' - 5° 30' Lintang Selatan dan 105° 28' - 105° 37' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Bandar Lampung adalah 192,18 km² dengan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah 790.895 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 41 jiwa/km².

Wilayah Pesisir secara konkrit merupakan tempat bertemunya pendatang dari berbagai daerah, Wilayah Pesisir menjadi mozaik sosial dan budaya, Ekosistem yang paling beragam, rumit dan produktif sebagian besar terletak di Wilayah Pesisir. Sangat penting peranannya dalam menjamin pengadaan pangan dunia, menumbuhkan dan menjaga keunikan sosial, budaya dan ekologi serta negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang memiliki sumberdaya yang sangat terbatas merupakan contoh dari cara hidup dalam lingkungan yang terbatas tetapi terbuka terhadap globalisasi.

Berbagai kegiatan atau faktor yang dilakukan manusia maupun yang disebabkan oleh alam memiliki potensi mengancam ekosistem Wilayah Pesisir. Aneka

pemanfaatan di Wilayah Pesisir sesungguhnya dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan yang memerlukan rumusan perencanaan terpadu dan berkelanjutan.

Tingginya aktifitas yang terjadi di pesisir Bandar Lampung telah menimbulkan permasalahan, seperti :

- 1) Telah terjadi degradasi lingkungan pesisir yang berat & kronis;
- 2) Telah terjadi kemiskinan struktural masyarakat pesisir yang semakin berat;
- 3) Telah terjadi kegiatan reklamasi yang dalam skala besar yang terus tumbuh dan cenderung tidak terencana;
- 4) Sangat mendesaknya kebutuhan mitigasi bencana terhadap kawasan Teluk Lampung yang terbukti memiliki ragam bencana yang lengkap serta sangat besar;
- 5) Belum terlihat usaha-usaha yang terencana dan terpadu untuk memanfaatkan potensi dan keunggulan Teluk Lampung;

Di perlukan adanya penanganan masalah tersebut, seperti rumusan penataan ruang, pengelolaan dan pengusahaan kawasan Wilayah Pesisir yang memiliki dimensi keterpaduan ekologis, sektoral, disiplin ilmu serta keterpaduan antar stakeholder, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai yaitu pertumbuhan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan serta adanya kepedulian antar generasi.

Namun rencana pemerintah untuk menata Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung terjadi perbedaan persepsi di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan sikap Pro dan Kontra dari kalangan masyarakat pesisir.

F. Skema Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, yang bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Metode kualitatif lebih menekankan pada makna generalisasi. Sugiyono (2007 : 9) menjelaskan, makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Dengan kata lain, penelitian ini menuntut peneliti selaku instrument untuk melihat *point of view* dari informannya.

Dalam memosisikan diri sebagai instrument penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan teknik utama yaitu *Indepth Interview*. Data akan dikumpulkan dalam berbagai cara intisari dokumen, observasi, dan notulensi rekaman wawancara. Data-data tersebut biasanya terlebih dulu diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan kalimat, dan penulisan).

Selain itu metode kualitatif ini dalam menggunakan analisis isi sebagai sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik khusus dalam sebuah teks. Analisis isi maksudnya untuk meneliti obyek tidak hidup, seperti dokumen-dokumen, catatan-

catatan, buku-buku, dan sebagainya. Sifatnya yang non-reaktif, akan menghindarkan dari hal-hal yang bersifat subyektif atau data yang rekayasa. Dengan demikian metode penelitian ini menganalisis obyek penelitian yaitu narasi dokumen dengan apa adanya, sebagaimana yang termuat dalam dokumen ilmiah sehingga data yang diperoleh dapat terjamin.

B. Fokus Penelitian

Guna mengetahui Pro dan Kontra penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung, maka fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang terjadi di Wilayah Pesisir dan pemahaman masyarakat yang Pro dan Kontra terhadap penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung.

Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan batas dalam pengumpulan data, sehingga pembatasan penelitian akan focus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Menurut Moleong (2005) penetapan fokus penelitian penting artinya dalam usaha menentukan batasan penelitian, sehingga dengan menentukan batas penelitian dapat menentukan lokasi penelitian dan dengan menentukan fokus secara efektif dalam menyaring informasi.

C. Lokasi/Setting Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Dimana pada lokasi penelitian tersebut terdapat perkampungan nelayan

yang sebagian besar merupakan masyarakat pesisir yang masuk katagaori masyarakat miskin.

D. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir yang tinggal di Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung. Tetapi jika ada informan yang membantu menggambarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian mengambil informan sesuai dengan setting penelitian di lapangan. Penelitian ini akan menentukan informan dengan cara *snowball* (menentukan informan berdasarkan petunjuk dari informan satu ke informan lainnya).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan pola *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participation obsetvation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2007). Oleh karena itu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara menurut (Esterberg, 2002) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

2. Observasi Lapangan

Observasi lapangan yaitu, dengan menggunakan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian serta meninjau lokasi yang menjadi objek penelitian. Teknik ini juga melakukan kajian dan pencatatan tentang berbagai hasil pengamatan, gejala-gejala ataupun gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*llife histories*), ceritera, biografi, peraturan atau undang-undang, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. yaitu mengumpulkan data skunder agar mencatat segala pemberitaan disurat kabar termasuk artikel yang berkaitan dengan penanganan.

F. Sumber Data

Berdasarkan permasalahan yang ada beserta fokus penelitian diatas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung, Kecamatan Telukbetung Selatan.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data primer diperoleh dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada sumber data. Data yang diperoleh merupakan hasil wawancara berdasarkan pantauan melalui daftar pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti terhadap sumber data.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian merupakan data yang diperlukan dalam rangka melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data sekunder dapat berupa dokumen yaitu; Perda, SK Walikota, Perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Patton (1980:268) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Kemudian memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan memberikan hubungan diantara dimensi-dimensi hubungan.

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisa data di lapangan model Miles dan Humberman ada 3 tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksikan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2007 : 247). Atas pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa reduksi data sebagai sebuah proses pemilihan dan pemusatan yang menggolongkan atau membuang data yang tidak perlu;

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2007 : 249). Melihat tahap penyajian data dilakukan setelah reduksi data, dengan demikian penyajian data dapat dilakukan sebagai kumpulan informasi yang sudah disusun atau terpola yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan;

3. Verifikasi

Verifikasi atau penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2007 : 252). Pada tahap ini kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk menyocokkan makna-makna yang

muncul dari data valid sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Letak Geografis

Kecamatan Telukbetung Selatan merupakan sebagian Wilayah Kota Bandar Lampung, dengan luas wilayah 1.063 Ha, dan berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Utara dan Kecamatan Tanjung Karang Timur.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panjang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Telukbetung Barat

Kecamatan Telukbetung Selatan secara geografis merupakan wilayah pantai yang membujur dari timur kearah barat Pantai Teluk Lampung. Kecamatan Telukbetung Selatan secara topografis mempunyai wilayah yang relative datar, terutama bagian yang menyusuri pantai dan sebagian kecil mempunyai wilayah perbukitan atau bergelombang, terutama dibagian utara wilayah Kecamatan Telukbetung Selatan

Terdapat 11 kelurahan yang berada di bawah pemerintahan Kecamatan Telukbetung Selatan. Dari seluruh kelurahan tersebut, terdapat 6 kelurahan yang

letak geografisnya berada di Wilayah Pesisir, yaitu kelurahan Pesawahan, Kangkung, Bumiwaras, Sukaraja, Way Lunik dan Ketapang.

Tabel 1 : Data Demografi Kecamatan Telukbetung Selatan

No.	Kelurahan	Luas (ha)	LK	RT	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
1.	Gedong Pakuon	36 Ha	3	15	4.205	988
2.	T a l a n g	46 Ha	2	28	7.636	1.746
3.	Pesawahan	63 Ha	3	47	13.625	2.575
4.	Teluk Betung	19 Ha	2	20	4.073	861
5.	Kangkung	30 Ha	3	26	12.087	3.251
6.	Bumi Waras	72 Ha	3	45	14.396	3.283
7.	Pecoh Raya	83 Ha	2	14	5.018	1.138
8.	Sukaraja	79 Ha	2	35	9.508	1.889
9.	Garuntang	110 Ha	2	25	7.136	1.606
10.	Ketapang	339 Ha	2	12	3.729	940
11.	Way Lunik	144 Ha	2	35	6.709	1.692
	J u m l a h	1.063 Ha	26	302	88.122	19.969

Sumber : Data Monografi Kecamatan Telukbetung Selatan

B. Sosial Ekonomi

Berdasarkan angka proyeksi tahun 2008 jumlah penduduk Kecamatan Telukbetung Selatan mencapai 88.122 jiwa penduduk tetapi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki mencapai 45.079 jiwa lebih besar

dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang mencapai 43.043 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Telukbetung Selatan tidak hanya disebabkan oleh angka kelahiran, melainkan juga perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa pesisir Kota Bandar Lampung memiliki daya tarik sehingga laju urbanisasi cukup tinggi. Berdasarkan data BPS tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Kecamatan Telukbetung Selatan cukup tinggi yaitu 30029,85 orang per meter persegi.

Tabel 2 : Data Penduduk Wilayah Pesisir

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
1.	Pesawahan	13.625	0,63	21626,98
2.	Kangkung	12.087	0,30	40290,00
3.	Bumi Waras	14.396	0,73	19720,55
4.	Sukaraja	9.508	0,79	12035,44
5.	Way Lunik	6.709	1,44	4659,03
6.	Ketapang	3.729	1,80	2071,67

Sumber : Data Kecamatan Telukbetung Selatan

Pesisir Kota Bandar Lampung menyimpan potensi besar seperti perikanan, pariwisata, peternakan, perkebunan dan lain sebagainya. Namun potensi yang besar tersebut belum dikelola secara maksimal dan pengelolaan yang ada sekarang belum memperhatikan aspek berkelanjutan. Komposisi penduduk pesisir Kota Bandar Lampung sangat heterogen yang didominasi oleh etnis Bugis, Jawa,

Banten, dan penduduk asli Lampung. Selain itu permasalahan sosial ekonomi masih menjadi permasalahan pokok masyarakat pesisir, rendahnya mutu sumberdaya manusia (SDM) yang rata-rata tamatan sekolah dasar (SD).

Berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan Kota Bandar Lampung tahun 2005-2015, pesisir Kota Bandar Lampung diperuntukan sebagai kawasan pariwisata, perdagangan, jasa transportasi, dan industri. Dilain sisi ancaman yang melanda pesisir Kota Bandar Lampung adalah masalah banjir. Banjir terjadi antara lain disebabkan oleh alur sungai yang menyempit karena pemukiman dan reklamasi pantai dibantaran sungai dan pembuangan sampah ke aliran sungai.

Berdasarkan hasil survey Jaring Perempuan Pesisir Kota Bandar Lampung angka kerja di Kecamatan Telukbetung Selatan mencapai jumlah 55,130 jiwa atau sekitar 62,6% dari jumlah penduduk, dan sejumlah 7,240 jiwa merupakan pencari kerja. Sebagaimana kawasan perkotaan lainnya, lapangan kerja didominasi oleh sektor sekunder dan tersier, yaitu; jasa, industri, dan perdagangan. Adapun sektor primer yang menonjol adalah perikanan yang sesuai dengan kondisi Wilayah Pesisir Kecamatan Telukbetung Selatan.

Tabel 3 : Data Penduduk Menurut Pekerjaan

No.	Kelurahan	PNS	TNI/ POLRI	Dagang	Tani	Tukang	Buruh	Pensiunan	Lain ²	Total Jiwa
1.	Gd. Pakuon	73	21	656	4	482	660	19	2.290	4.205
2.	Talang	402	281	810	279	290	2.880	428	2.266	7.636
3.	Pesawahan	257	8	4.897	-	391	1.993	575	5.504	11.050
4.	Teluk Betung	76	3	504	-	46	546	130	2.768	4.073
5.	Kangkung	37	2	2.052	98	248	4.758	17	4.875	11.610

6.	Bumi Waras	107	12	3.857	-	515	5.672	65	4.168	13.294
7.	Pecoh Raya	194	8	664	120	202	1.459	134	2.237	5.018
8.	Sukaraja	75	10	515	920	83	645	35	7.225	9.070
9.	Garuntang	153	15	274	120	277	1.255	60	4982	7.136
10.	Ketapang	62	12	717	523	88	1.731	26	570	3.748
11.	Way Lunik	95	16	987	50	65	2.128	21	3.567	7.212
		1.531	388	15.933	2.114	2.687	23.727	1.510	40.232	88.122

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Telukbetung Selatan

Pada table diatas terlihat hampir setengah dari jumlah penduduk bekerja di sektor informal seperti; nelayan dan pekerja musiman serta belum masuk dalam katagori usia produktif kerja yaitu sebesar 40.232 jiwa (45,7% dari jumlah penduduk). Selanjutnya masyarakat bekerja sebagai buruh yakni 23.727 jiwa (26,9% dari total penduduk yang ada). Di samping itu juga masih banyak diantara mereka yang bekerja sebagai pedagang yakni 15.933 jiwa (18,1% dari total penduduk yang ada). Sejumlah 2.687 jiwa (3% dari total penduduk yang ada) bekerja sebagai tukang. Penduduk yang bekerja sebagai tani sebanyak 2.114 jiwa (2,4% dari total penduduk yang ada). Berikutnya sebanyak 1.531 jiwa (1,7% dari total penduduk yang ada) bekerja sebagai PNS. 1.510 jiwa (1,7% dari total penduduk yang ada) berpenghasilan sebagai pensiunan dan 388 jiwa (0,4% dari total penduduk yang ada) bekerja sebagai TNI/POLRI.

V. PEMBAHASAN

A. Wilayah Pesisir

Pengertian Wilayah Pesisir berdasarkan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yaitu "Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat Wilayah Pesisir meliputi baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut mencakup bagian laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran".

Pemahaman masyarakat mengenai Wilayah Pesisir menjadi salah satu faktor yang menentukan seseorang memilih hidup di Wilayah Pesisir.

Data ini ditemukan dari hasil wawancara dengan informan 1

Wilayah Pesisir merupakan tempat bertemunya wilayah daratan dan laut. Pada jaman dulu Wilayah Pesisir merupakan wilayah strategis transportasi. Sebagian besar warga pesisir merupakan mayoritas warga pendatang yang bekerja di sektor informal dan mereka tinggal di perkampungan informal dari berbagai etnis. Arus kedatangannya beragam, ada yang sudah mulai sejak tahun 1957, 1968 dan ada yang baru datang pada tahun 1988 bahkan tahun-tahun setelah 1990. Masyarakat pesisir Bandar Lampung sebagian besar merupakan masyarakat miskin yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan, buruh, tukang becak dan pedagang kecil, tukang jamu dan lain-lain.

Menurut Dahuri, et.al., (2004) “Wilayah Pesisir merupakan suatu kesatuan ekologi yang mempertemukan kawasan darat dan laut”. Selain sebagai wilayah strategis bagi kegiatan transportasi antar pulau, Wilayah Pesisir pun mempunyai potensi kekayaan yang besar, dan dapat dengan mudah terkena dampak dari aktivitas manusia. Oleh sebab itu diperlukan adanya pemanfaatan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Adapun karakteristik umum dari wilayah laut dan pesisir dapat disampaikan sebagai berikut:

- f. Laut merupakan sumber dari “*common property resources*” (sumber daya milik bersama), sehingga kawasan memiliki fungsi publik/kepentingan umum.
- g. Laut merupakan “*open access regime*”, memungkinkan siapa pun untuk memanfaatkan ruang untuk berbagai kepentingan.
- h. Laut bersifat “*fluida*”, dimana sumber daya (biota laut) dan dinamika *hydro-oceanography* tidak dapat disekat/dikapling.
- i. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan).
- j. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

(Setia Budhy Algamar, 2003)

Menurut Kepres Nomor 32 Tahun 1990 kawasan 100 meter dari pasang tertinggi merupakan sempadan pantai yang perlu dilindungi. Wilayah Pesisir Bandar Lampung memiliki permasalahan yang rumit, mengingat kawasan tersebut lahannya telah menjadi hak milik dan aktifitas kegiatan di sepanjang pantai telah menutupi pantai sebagai ruang publik. Untuk mengembalikan fungsi pantai dengan fungsi lindungnya sebagai sempadan pantai dan ruang publik diperlukan reklamasi pantai yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan Kota Bandar Lampung tahun 2005 - 2015 terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi pengambilan keputusan untuk dilakukan reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung :

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak memiliki lahan yang memadai dapat di gunakan untuk mengenerate pembangunan kota khususnya di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung;
2. Pada kenyataannya lahan-lahan di sepanjang Wilayah Pesisir sepanjang 16 km adalah hak milik beberapa orang saja, dimana berdasarkan UU Agraria, kepemilikan hak atas tanah bersifat mutlak sehingga sulit bagi pihak pemerintah daerah untuk mengatur dan menata kawasan pantai sesuai dengan rencana yang disusun, terlebih pihak pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk dapat membebaskan lahan disepanjang pantai;
3. Wilayah Pesisir merupakan kawasan yang sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi pengembangan kegiatan khususnya bagi pedagang, jasa, pariwisata maupun permukiman sehingga di perlukan upaya-upaya penataan Wilayah Pesisir guna memanfaatkan potensi yang dimiliki tersebut;

4. Dalam studi sektor perencanaan Kota 1997-1998 disebutkan bahwa peran yang akan dikembangkan bagi Kota Bandar Lampung adalah sebagai pusat penggerak pembangunan regional baik dalam konteks Sumatera Bagian Selatan, Provinsi Lampung maupun Kawasan Aglomerasi Bandar Lampung. Fungsi utama yang dikembangkan adalah sebagai kota perdagangan dan jasa. Sektor yang dikembangkan untuk menunjang fungsi tersebut adalah, transportasi, perdagangan jasa, pariwisata, pendidikan tinggi dan industri manufaktur.

Berbagai pendapat yang mengungkapkan perlunya pemanfaatan potensi kekayaan sumberdaya alam yang terkandung dalam Wilayah Pesisir dapat disimak dalam pernyataan Informan 3 dan informan 5

“Penataan pesisir Kota Bandar Lampung saat ini sudah menjadi hal yang mendesak bagi pembangunan Kota Bandar Lampung. Dengan adanya penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung secara langsung akan berdampak pada perkembangan ekonomi yang akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Kota Bandar Lampung secara umum dan masyarakat pesisir secara khusus. Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas apabila ingin memajukan pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung.”

“Penataan pesisir Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan pendapatan daerah sebab di Wilayah Pesisir inilah terdapat berjuta kekayaan alam yang belum secara maksimal digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung terdapat potensi pariwisata, perikanan, perkebunan sumberdaya laut yang masih belum dapat di lakukan oleh masyarakat setempat. Pemerintah seharusnya mencanangkan program pembinaan terhadap masyarakat pesisir dalam hal pengolahan sumber daya yang terkandung di Wilayah Pesisir. Bukan hanya mencanangkan pembangunan saja tetapi masyarakat di arahkan untuk dapat menggali potensi Wilayah Pesisir. Dengan kata lain masyarakat pesisir di arahkan untuk dapat mengolah sumber daya yang ada di Wilayah Pesisir.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan, adalah:

- Adanya perbedaan kepentingan yang cenderung menjurus ke konflik kepentingan antar sektoral dan stakeholder lainnya. Konflik kepentingan ini tidak hanya terjadi antar sektoral dalam pemerintahan tetapi juga dengan masyarakat setempat dan pihak swasta.

Data ini ditemukan dari hasil wawancara dengan informan 4.

Masyarakat pesisir saat ini seakan tersingkirkan akibat adanya perbedaan kepentingan pengelolaan Wilayah Pesisir. Kepentingan para elit atau mereka yang memiliki modal yang besar telah menyebabkan kepentingan masyarakat tersingkirkan. Pembangunan hotel, gudang dan pabrik di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung menjadikan penataan kawasan tersebut tidak tertata dengan baik. Itulah sebabnya mengapa Wilayah Pesisir menjadi kawasan kumuh. Di sisi lain masyarakat yang tersingkirkan mencari ruang untuk dapat bertahan hidup. Sehingga penataan ruang tidak dapat terkontrol dengan baik.

- Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan sumber daya pesisir dan lautan, serta perangkat hukum untuk penegakannya menyebabkan masih banyaknya pemanfaatan sumberdaya ini yang tidak terkendali. Juga tidak adanya kekuatan hukum dan pengakuan terhadap sistem-sistem tradisional serta wilayah ulayat laut dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.

Data ini ditemukan dari hasil wawancara dengan informan 1.

Apabila ada anggota masyarakat yang ingin mendirikan tempat tinggal di bibir pantai bahkan di atas laut sekalipun, cukup meminta izin kepada ketua lingkungan dan ketua RT setempat, karena tidak ada hak bagi ketua lingkungan dan ketua RT untuk melarang warga yang ingin mendirikan bangunan di bibir pantai.

- Masih minimnya keikutsertaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Tidak mengherankan apabila masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki terhadap pesisir dan lautan yang lestari serta

pemahaman tentang pentingnya nilai ekonomis dan non-ekonomis dari keberadaan pesisir dan lautan yang perlu dijaga.

Data ini ditemukan dari hasil wawancara dengan informan 6.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan lingkungan membuat Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung menjadi kawasan kumuh. Masyarakat seakan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, padahal mereka dapat menggali potensi kekayaan yang terkandung di Wilayah Pesisir. Hal ini dapat di pelajari melalui pelatihan-pelatihan yang di adakan pemerintah baik tingkat Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung. Banyak warga masyarakat yang enggan mengikuti pelatihan-pelatihan, alasan mereka tidak adanya waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut sebab mereka harus mencari nafkah.

Adanya perbedaan kepentingan, lemahnya kerangka hukum dalam pengelolaan Wilayah Pesisir serta minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan telah menimbulkan permasalahan baru di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang cukup kompleks inilah yang menjadi dasar adanya penataan ruang wilayah Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dapat di lakukan apabila penataan Wilayah Pesisir dilakukan atas dasar pengelompokan potensi Wilayah Pesisir sehingga potensi yang ada dapat termanfaatkan dengan baik tanpa adanya perbedaan kepentingan.

Permasalahan timbul akibat adanya perbedaan kepentingan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung secara langsung berdampak pada tata ruang Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung sehingga pemanfaatan potensi tidak dapat dikelola dengan baik. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang mengontrol dan mempengaruhi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Wilayah Pesisir guna terwujudnya penataan ruang wilayah Wilayah

Pesisir Kota Bandar Lampung yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pengelolaan Wilayah Pesisir dapat tertata dengan baik sesuai dengan tujuan

B. Permasalahan Wilayah Pesisir

Pratikto (2005) mengemukakan fenomena yang terjadi pada masyarakat pesisir disebabkan oleh tiga hal yaitu;

- a) Kemiskinan struktural, berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor luar (eksternal) seperti sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan insentif, fasilitas pembangunan dan teknologi;

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan 4

Secara umum permasalahan yang ada pada masyarakat pesisir ialah masalah ekonomi. Banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap. Apalagi pada musim pancaroba seperti saat ini angin laut sangat berbahaya apabila sedang berlayar mencari ikan.

- b) Kemiskinan super-struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan makro yang tidak pro pembangunan masyarakat pesisir seperti kebijakan pemerintahan yang berupa proyek dan program pembangunan;

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan 2

Potensi kekayaan pesisir saat ini kurang dapat dipergunakan secara maksimal padahal potensi yang terkandung dalam kawasan pesisir sangat luar biasa. Permasalahan pokok yang ada pada masyarakat pesisir merupakan permasalahan ekonomi. Sebagian besar masyarakat pesisir merupakan masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp. 700.000,- per bulan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga tarap hidup masyarakat dapat dikatakan jauh dari kata sejahtera.

- c) Kemiskinan kultural, merupakan kemiskinan yang berkaitan dengan keadaan yang melekat pada masyarakat pesisir seperti gaya hidup, tingkat pendidikan, budaya, adat, serta kepercayaan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan 6

Banyak dari masyarakat tidak memahami permasalahan yang mereka hadapi, yang masyarakat tahu hanya bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagian besar dari masyarakat pesisir berkerja sebagai buruh, nelayan dan dagang, rata-rata pendidikan mereka hanya tamatan SLTP. Hal tersebut telah menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan.

Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung merupakan wilayah padat penduduk dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Permasalahan ekonomi, serifikasi tanah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Menjadi faktor penyebab mengapa masyarakat pesisir berada pada tingkat kemiskinan. Seperti yang dijabarkan dalam table 4.

Tabel 4 Permasalahan Masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung

No.	Permasalahan	Persentase (%)
1.	Ekonomi	35
2.	Sertifikasi Tanah	30
3.	Pendidikan	15
4.	Kesehatan	11
5.	Lain-lain (Fasilitas pembangunan)	9

Sumber : *Survey Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Kota Bandar Lampung, Tahun 2008*

C. Tata Ruang

Tata ruang menurut Erna Witoelar (2007) adalah kegiatan penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Struktur ruang pada hakikatnya merupakan hasil dari suatu proses yang mengalokasikan objek-objek fisik dan aktifitas kesatuan kawasan disuatu wilayah. Pemanfaatan ruang yang timbul akibat adanya aktifitas yang tidak terorganisir telah mengakibatkan penataan ruang yang tidak baik sehingga menimbulkan pemukiman kumuh di Wilayah Pesisir. Pengelolaan Wilayah Pesisir yang tidak

baik telah menyebabkan adanya aktivitas yang tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan pemanfaatan potensi Wilayah Pesisir.

Di lapangan penataan ruang Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung yang semestinya dapat mengoptimalkan potensi kekayaan alam yang terkandung dalam Wilayah Pesisir justru saat ini mengancam keberadaan ekosistem dan kelestarian alam. Semestinya seluruh unsur baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat yang memiliki kepentingan dapat menjaga kelestarian lingkungan guna pemanfaatan potensi pesisir.

Pemanfaatan Wilayah Pesisir dapat dibagi menjadi dua tipe pengelolaan Wilayah Pesisir guna terwujudnya penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung yang berorientasi pada pemanfaatan potensi Wilayah Pesisir sehingga dapat menyalurkan seluruh kepentingan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir. (1) proses yang mengalokasikan aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan hubungan fungsional tertentu. Kedua, proses pengadaan atau ketersediaan fisik yang menjawab kebutuhan akan ruang bagi aktivitas seperti tempat bekerja, tempat tinggal, transportasi dan komunikasi. (Rencana Tata Ruang Wilayah Bandar Lampung, 2003)

Namun data yang ditemukan dari hasil wawancara dengan informan 2

“Pesisir Kota Bandar Lampung merupakan wilayah yang selama ini mendapat perhatian yang kurang dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, orientasi pembangunan yang ada pada saat ini lebih cenderung ke kawasan darat sehingga pembangunan di Wilayah Pesisir kurang terkontrol dan cenderung tidak teratur sehingga terkesan seperti kolam sampah raksasa. Potensi kekayaan pesisir saat ini kurang dapat di

pergunakan secara maksimal padahal potensi yang terkandung dalam kawasan pesisir sangat luar biasa”.

Penataan Wilayah Pesisir seharusnya dapat memaksimalkan potensi Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung sehingga pemanfaatan sumber daya yang terkandung dalam Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung dapat dimanfaatkan secara optimal. Tata ruang yang ideal bertujuan memanfaatkan potensi pesisir guna kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan tata ruang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya, serta dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan perkembangan antara kawasan di dalam Wilayah Pesisir dan kawasan lain yang terkait di sekitarnya.

Pendekatan penataan ruang ini merupakan pendekatan pengelolaan ruang yang harus menjamin adanya kepentingan sektoral yang terakomodir dan terintegrasi dan dalam prosesnya (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan) didukung oleh keterlibatan masyarakat serta didukung oleh sistem kelembagaan yang mengarah pada adanya forum komunikasi yang kuat antar stakeholder. Hal tersebut dapat disimak sebagai perbandingan apa yang dikemukakan oleh informan 4

“Penataan ruang yang ideal menurutnya harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat setempat tidak dipinggirkan akibat kepentingan-kepentingan bisnis para elit. Keberadaan masyarakat selama puluhan tahun bukan tidak memberikan kontribusi kepada daerah”.

Tabel 5 Fungsi Tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Bandar Lampung

BWK	Fungsi Kota	Peranan Kota
BWK H	Fungsi Utama : 5. Pusat Pemerintahan 6. Perdagangan Grosir 7. Pariwisata Pantai	1. Menyediakan sarana Perkantoran Pemerintah 2. Menyediakan Pusat Perdagangan dengan skala pelayanan Regional 3. Penataan Kawasan Reklamasi Pantai 4. Merangsang perkembangan sector yang menunjang pariwisata.
	Fungsi Pendukung : 1. Jasa Umum 2. Industri Kecil 3. Konservasi	1. Menciptakan sarana pelayanan umum 2. Penataan perumahan pinggir sungai 3. Pengamanan Kawasan Lindung

Sumber : Evaluasi dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2003.

Pada dasarnya masyarakat menuntut transparansi pembangunan dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Sehingga masyarakat merasa dilibatkan secara aktif dalam penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung. Saat ini masyarakat pesisir merasa tersingkirkan akibat adanya rencana penataan ruang Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung. Kekhawatiran mereka akan adanya relokasi/pengusuran dan keterbatasan berlayar nelayan untuk menangkap ikan akan berakibat pada hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Kepentingan para elit yang memiliki modal besar menyebabkan mereka semakin tersingkirkan. Masyarakat pesisir

menganggap mereka berhak dilibatkan dalam penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung sehingga kepentingan mereka tidak lagi dipinggirkan.

D. Pro dan Kontra masyarakat Terhadap Penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1954), pro diartikan sebagai pernyataan setuju. Sedangkan kontra diartikan menentang atau tidak menyetujui.

Pro Kontra terjadi akibat adanya perbedaan persepsi mengenai konsep Penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung. Perbedaan persepsi di sebabkan oleh beberapa hal, seperti; permasalahan ekonomi, serifikasi tanah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

1. Masyarakat yang pro Terhadap Penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung

Wilayah Pesisir memiliki potensi kekayaan yang besar seperti, potensi perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, transportasi dan lain sebagainya. Namun pemanfaatan potensi tersebut saat ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Penataan Wilayah Pesisir pada umumnya bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat pesisir memandang perlu adanya penataan Wilayah Pesisir guna memaksimalkan pemanfaatan potensi kekayaan alam yang tersedia di Wilayah Pesisir Kota Bandar

Lampung. Hal ini dapat di simak pada data wawancara dengan informan 3 dan informan 5

“Dengan adanya penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung secara langsung akan berdampak pada perkembangan ekonomi. Setiap pembangunan pasti akan menyebabkan relokasi, itu merupakan konsekuensi dari pembangunan. Mau tidak mau, suka tidak suka sebagai warga masyarakat kita harus bersedia apabila harus direlokasi karena Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyediakan RUSUNAWA yang diperuntukan bagi masyarakat pesisir oleh sebab itu saya sebagai warga yang tinggal di Wilayah Pesisir harus bersedia apabila ada relokasi.

“Penataan pesisir Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan pendapatan daerah sebab di Wilayah Pesisir inilah terdapat berjuta kekayaan alam yang belum secara maksimal digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung terdapat potensi pariwisata, perikanan, perkebunan sumberdaya laut yang masih belum dapat di lakukan oleh masyarakat setempat. Apabila penataan Wilayah Pesisir diikuti dengan rencana relokasi maka saya sebagai masyarakat pesisir yang memiliki hak kepemilikan tanah dan bangunan yang sah di keluarkan oleh BPN Kota Bandar Lampung maka saya berhak menuntut ganti rugi dan pemerintah tidak dapat sertamerta merelokasi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah tanpa adanya keputusan ganti rugi yang sesuai dengan nilai jual tanah dan bangunan yang berlaku.”

Dengan adanya penataan Wilayah Pesisir pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dapat lebih terarah dengan tetap menjaga fungsi dari Wilayah Pesisir, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya yang terkandung di Wilayah Pesisir. Pemanfaatan Wilayah Pesisir yang terarah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman masyarakat mengenai konsep penataan Wilayah Pesisir yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerusakan lingkungan serta konflik kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir telah menimbulkan permasalahan baru. Sehingga

diperlukan adanya suatu tindakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir. Mengingat potensi sumberdaya yang terkandung dalam Wilayah Pesisir ialah sumberdaya yang dapat di perbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu diperlukan adanya penataan Wilayah Pesisir yang berwawasan lingkungan guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya Wilayah Pesisir.

2. Masyarakat yang kontra Terhadap Penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung

Pada dasarnya masyarakat memahami tujuan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menata kawasan pesisir. Penataan Wilayah Pesisir bertujuan memaksimalkan pemanfaatan potensi Wilayah Pesisir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dukungan masyarakat dalam pembangunan dibayangi kekhawatiran akan adanya relokasi/penggusuran. Seperti yang dikemukakan oleh informan 1, informan 2, informan 4 dan informan 6

Informan 1

“Saya mendukung program tersebut asalkan saya tidak di pindahkan dari tempat tinggal saya. Apabila pemerintah merelokasi tempat tinggal kami maka ribuan masyarakat terancam kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian”

Informan 2

“Pada dasarnya masyarakat pesisir mendukung program tersebut namun yang dikhawatirkan oleh masyarakat pesisir ialah relokasi atau penggusuran, ada ketakutan dari mereka apabila terjadi penggusuran mereka akan kehilangan hak ganti rugi tanah dan bangunan karena keberadaan mereka saat ini dapat di katakan ilegal sebab tidak memiliki sertifikat tanah tambah lagi sebagian besar mata pencharaian masyarakat

peisir merupakan sebagi nelayan sehingga banyak dari mereka terancam kehilangan mata pencaharian.”

Informan 4

“Masyarakat pesisir pada umumnya mendukung program tersebut namun masyarakat menolak apabila ada rencana relokasi. Penataan ruang yang ideal menurutnya harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat setempat tidak dipinggirkan akibat kepentingan-kepentingan bisnis para elit.”

Informan 6

“Kami mendukung sepenuhnya program pemerintah namun kami menolak apabila kami harus direlokasi sebab kehidupan kami sangat tergantung pada Wilayah Pesisir, di sinilah kami hidup dan disinilah kami mati. Apa tidak ada alternatif masyarakat dilibatkan?.”

Kekhawatiran masyarakat akan adanya relokasi/penggusuran sangat beralasan sebab apabila terjadi penggusuran masyarakat terancam kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Karena banyak masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada Wilayah Pesisir. Banyak dari masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan. Belum lagi munculnya konflik sosial seperti konflik tanah yang mana banyak masyarakat pesisir tidak memiliki sertifikat tanah yang sah sebab tanah tempat tinggal mereka sesungguhnya masuk pada area sepadan pantai yang harus dilindungi. Hal tersebut telah menimbulkan adanya penolakan dari masyarakat terhadap penataan Wilayah Pesisir.

Masyarakat yang menolak penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung menghendaki adanya penataan yang melibatkan masyarakat Wilayah Pesisir. Masyarakat menganggap pembangunan yang adil merupakan pembangunan yang secara langsung melibatkan masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat setempat. Penataan yang di kehendaki masyarakat pesisir merupakan penataan yang tidak diikuti oleh adanya rencana relokasi/penggusuran lahan tempat tinggal masyarakat. Sehingga penataan yang ada tidak mengorbankan masyarakat pesisir akibat adanya kepentingan para elit yang memiliki modal besar untuk mengelola Wilayah Pesisir.

Pro dan Kontra yang terjadi pada masyarakat pesisir disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap konsep penataan Wilayah Pesisir. Oleh sebab itu diperlukan adanya pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap konsep penataan Wilayah Pesisir sehingga perbedaan yang menyebabkan Pro dan Kontra penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung dapat ditemukan jalan tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Dari pemaparan di atas dapat diambil beberapa deskripsi hasil penelitian sebagai berikut :

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kompleksnya permasalahan yang ada di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sehubungan dengan Pro dan Kontra Penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung.

1. Permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir merupakan masalah ekonomi, serifikasi tanah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai aspek, seperti; a) fasilitas pembangunan, b) kebijakan pembangunan c) tingkat pendidikan, dan d) minimnya lapangan pekerjaan. Namun permasalahan pokok yang menimbulkan Pro dan Kontra penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu :
 - a) Konflik pengelolaan Wilayah Pesisir;
 - b) Rendahnya penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan Wilayah Pesisir;
 - c) Telah terjadi kemiskinan struktural masyarakat pesisir yang semakin berat;
 - d) Belum adanya usaha-usaha yang terencana dan terpadu untuk memanfaatkan potensi dan keunggulan pesisir Kota Bandar Lampung.

- 2 Pro dan Kontra dalam penataan Wilayah Pesisir disebabkan oleh perbedaan pemahaman konsep penataan Wilayah Pesisir. Masyarakat berpendapat bahwa dengan adanya penataan Wilayah Pesisir akan meningkatkan pemanfaatan potensi Wilayah Pesisir sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun dilain sisi masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap penataan Wilayah Pesisir yang diikuti dengan adanya relokasi/pengusuran. Sebagian besar kehidupan masyarakat pesisir sangat bergantung pada Wilayah Pesisir yang mana kebanyakan dari masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan.

B. SARAN

Berdasarkan pengamatan dan analisa dari penelitian diatas maka saran yang dapat penulis ungkapkan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai elemen seperti Pemerintah Kota Bandar Lampung, LSM dan segenap lapisan masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan Wilayah Pesisir sehingga kelestarian Wilayah Pesisir dapat terjaga;
2. Disarankan adanya peningkatan kerjasama yang lebih baik antara *stakeholder* seperti Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pengusaha dan masyarakat pesisir. Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir guna memaksimalkan potensi pesisir Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarti, Mona. 2008. *Pelaksanaan Strategi Pembangunan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin*. Lampung : Skripsi Unila.
- Dahuri, Rokhmin, et. al. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2003. *Evaluasi dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Bandar Lampung Tahun 2005-2015*. Bandar Lampung.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1954. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Perpustakaan Perguruan Kementrian P. P. dan K.
- Soegiarto, A. 1976. *Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Jakarta: Lembaga Oseanologi Nasional.
- Sudardja, Dadang. 2005. *Membangun Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Tata Ruang*. Training Of Traner Konsorsium Pokmas Tata Ruang Bodetebek.
- Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Artikel Seminar / Jurnal / Majalah Ilmiah / Website :

Mahmud, Amir. 2007. *Model Komunikasi Pembangunan Dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah*. Semarang : Tesis UNDIP.

Witoelar, Erna. 2007. *Tata Ruang Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta : Departemen Peremukiman dan Prasarana Wilayah. Pada Forum Nasional Tata Ruang di Jakarta, 18 April 2007.

Algamar, Setia Budhy. 2003. *Peran Penataan Ruang Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Yang Baik*

http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah_pesisir, Tanggal Kunjung: 14 Juni 2011.

<http://adjhee.wordpress.com/2007/11/21/antara-penataan-kota-dan-kesejahteraan/#comment-276>

<http://bandarlampungkota.go.id>

<http://goodgovernance.or.id>

<http://annesdecha.blogspot.com/2011/03/definisi-tata-kota-dan-ruang-wilayah.html>

www.setneg.go.id

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Menanyakan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir;
2. Meminta pendapat informan mengenai RUSUNAWA;
3. Menggali pemahaman informan mengenai penataan ruang wilayah pesisir kota Bandar Lampung;
4. Meminta pendapat informan mengenai penataan ruang wilayah pesisir Kota Bandar Lampung.

1. Informan 1 (M/54)

Nama : Muchidin

Status : Kawin

Lama Tinggal : 54 Tahun

Pekerjaan : Ketua RT, Buruh

Informan pertama bernama Muchidin. Muchidin merupakan seorang Ketua RT 06 Lingkungan II Kelurahan Kangkung Kecamatan Telukbetung Selatan, berjenis kelamin laki-laki bersuku Jawa. Muchidin berusia 54 tahun dan bertempat tinggal di Kelurahan Kangkung Kecamatan Telukbetung Selatan. Muchidin hanya berpendidikan SR (Sekolah Rakyat) atau setingkat Sekolah Dasar, bapak 4 putra dan 2 orang putri ini sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan selain menjadi Ketua RT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai keperluan pendidikan anak-anaknya.

Mengenai pemahaman kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, Muchidin mengatakan :

“Kawasan pesisir merupakan tempat bertemunya wilayah daratan dan laut. Pada jaman dulu kawasan pesisir merupakan wilayah strategis transportasi. Sebagian besar warga pesisir merupakan mayoritas warga pendatang yang bekerja di sektor informal dan mereka tinggal di perkampungan informal dari berbagai etnis. Arus kedatangannya beragam, ada yang sudah mulai sejak tahun 1957, 1968 dan ada yang baru datang pada tahun 1988 bahkan tahun-tahun setelah 1990. Masyarakat pesisir Bandar Lampung sebagian besar merupakan masyarakat miskin yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan, buruh, tukang becak dan pedagang kecil, tukang jamu dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat pesisir tidak memiliki status tanah tempat tinggal yang sah/legal di keluarkan oleh BPN namun penduduk sekitar tetap membangun tempat tinggal di lahan tersebut. Muchidin menjelaskan banyak penduduk di lingkungannya tidak memiliki sertifikat tanah

termasuk dirinya, apabila ada anggota masyarakat yang ingin mendirikan tempat tinggal di bibir pantai bahkan di atas laut sekalipun, cukup meminta izin kepada ketua lingkungan dan ketua RT setempat, karena tidak ada hak bagi ketua lingkungan dan ketua RT untuk melarang warga yang ingin mendirikan bangunan di bibir pantai. Telah terjadinya pergeseran bibir pantai karena adanya aktifitas penimbunan tanah oleh warga sekitar guna memperluas lahan untuk tempat tinggal mereka. Penimbunan tersebut terjadi bukan pula semata-mata aktifitas warga sekitar namun adanya penumpukan sampah dan tanah yang terbawa oleh ombak pantai sehingga terjadinya penimbunan yang mengakibatkan meluasnya wilayah daratan. Hal tersebut diyakini menjadi penyebab timbulnya daerah kumuh (slum area) sebab tidak adanya atau belum adanya peraturan resmi yang melarang masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan di bibir pantai.”

Pada saat ditanya mengenai persepsi masyarakat terhadap penataan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, Muchidin menjelaskan :

“Rencana Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menata kawasan pesisir merupakan bentuk dari program pembangunan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menata kawasan pesisir yang saat ini sudah sangat kumuh. Secara pribadi saya mendukung program tersebut karena tujuannya untuk menata dan memperindah kota Bandar Lampung. Namun yang menjadi penyebab penolakan masyarakat sekitar apabila pemerintah merelokasi penduduk. Saya mendukung program tersebut asalkan saya tidak di pindahkan dari tempat tinggal saya. Apabila pemerintah merelokasi tempat tinggal kami maka ribuan masyarakat terancam kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian. Karena sebagian besar masyarakat sekitar berpenghasilan sebagai nelayan, buruh bangunan, buruh pabrik dan berdagang dan rata-rata penghasilan mereka Rp. 10.000,- per hari.”

2. Informan 2 (N/47)

Nama : Nurhayati

Status : Kawin

Lama Tinggal : 48 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nurhayati merupakan Koordinator Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Kota Bandar Lampung, berjenis kelamin perempuan bersuku Jawa. Nurhayati bertempat tinggal di Kelurahan Bumiwaras Kecamatan Telukbetung Selatan. Nurhayati merupakan ibu rumah tangga yang hanya lulus SLTA. Ibu 2 orang anak, 1 orang putra dan 1 orang putri ini merupakan salah satu aktifis perempuan pesisir.

Nurhayati merupakan salah satu penggerak Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Kota Bandar Lampung. Pada saat di tanya mengenai permasalahan yang ada pada masyarakat pesisir, Nurhayati menuturkan :

“Pesisir Kota Bandar Lampung merupakan wilayah yang selama ini mendapat perhatian yang kurang dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, orientasi pembangunan yang ada pada saat ini lebih cenderung ke kawasan darat sehingga pembangunan di kawasan pesisir kurang terkendali dan cenderung tidak teratur sehingga terkesan seperti kolam sampah raksasa. Potensi kekayaan pesisir saat ini kurang dapat di pergunakan secara maksimal padahal potensi yang terkandung dalam kawasan pesisir sangat luar biasa. Permasalahan pokok yang ada pada masyarakat pesisir merupakan permasalahan ekonomi. Sebagian besar masyarakat pesisir merupakan masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp. 700.000,- per bulan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga tarap hidup masyarakat dapat dikatakan jauh dari kata sejahtera. Minimnya kesejahteraan masyarakat inilah yang menyebabkan kawasan pesisir menjadi kawasan

kumuh. Banyak masyarakat yang mendirikan bangunan dengan seenaknya di bibir pantai sebagai tempat tinggal dan membuang limbah rumah tangganya kelaut hal tersebut tidak dibarengi oleh sikap tegas pemerintah untuk melarang masyarakat mendirikan bangunan di bibir pantai sehingga penataan lingkungan dapat terkendali”

Ketika di tanya mengenai peran perempuan pesisir dalam mengatasi masalah ekonomi, Nurhayati menuturkan :

“Sebelum terbentuknya Jaring Perempuan Pesisir (JPrP) Kota Bandar Lampung para ibu dan remaja putri hanya terbatas menunggu nafkah dari suami atau kepala keluarga, sedangkan kita sama-sama tahu bahwa kebutuhan ekonomi sangat mendesak. Oleh karena itu kami melakukan pendekatan dengan berbincang dalam satu wadah yang memfasilitasi permasalahan yang kami hadapi. Sadar bahwa kami memerlukan wadah dan kami melakukan pendekatan personal dengan perempuan sekitar. Pada saat kami telah bergabung dalam suatu wadah Lembaga Swadaya Masyarakat, kami menganalisa permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Permasalahan utama yang timbul adalah sumber pendapatan bagi perempuan untuk membantu kepala keluarga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Minimnya peluang usaha dan rendahnya penyerapan tenaga bagi para perempuan kerja tolak ukur permasalahan yang ada sehingga kami melakukan pelatihan-pelatihan pengembangan usaha seperti kegiatan daur ulang sampah. dan sekarang Alhamdulillah dari kegiatan tersebut para perempuan yang tergabung dalam Jaring Perempuan Pesisir mendapatkan penghasilan tambahan walaupun tidak banyak tetapi minimal dapat mengurangi beban kebutuhan rumah tangga”

Ketika di tanya mengenai persepsi masyarakat pesisir terhadap penataan wilayah pesisir, Nurhayati menjelaskan :

“Pada dasarnya masyarakat pesisir mendukung program tersebut namun yang dikhawatirkan oleh masyarakat pesisir ialah relokasi atau penggusuran, ada ketakutan dari mereka apabila terjadi penggusuran mereka akan kehilangan hak ganti rugi tanah dan bangunan karena keberadaan mereka saat ini dapat di katakan ilegal sebab tidak memiliki sertifikat tanah tambah lagi sebagian besar mata pencaharian masyarakat pesisir merupakan sebagai nelayan sehingga banyak dari mereka terancam kehilangan mata pencaharian. Oleh sebab itu penolakan masyarakat terhadap penataan pesisir tidak beralasan, satu sisi masyarakat sadar dan menganggap penataan pesisir perlu dilakukan sisi lain masyarakat tidak

menghendaki adanya relokasi yang mengharuskan mereka pindah dari kawasan mereka tinggal karena di sini lah tempat mereka menjalani kehidupan selama puluhan tahun.”

3. Informan 3 (G/49)

Nama : Gunawan

Status : Kawin

Lama Tinggal : 39 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Gunawan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil Kota Bandar Lampung. Bapak 3 orang anak ini bertempat tinggal di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Telukbetung Selatan. Ketika ditanya mengenai permasalahan yang terjadi pada masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung, Gunawan menyatakan :

“Secara sosial-ekonomi kehidupan masyarakat pesisir sangat jauh dari taraf hidup sejahtera karena masih banyak penduduk pesisir hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian dari mereka berpenghasilan sebagai nelayan, buruh dan tukang becak yang berpendapatan Rp. 10.000,- per hari. Nilai tersebut sangat dirasakan sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari belum di tambah biaya pendidikan anak-anak mereka. Banyak masyarakat di Kelurahan Sukaraja mengeluhkan banjir apabila ada air pasang laut. Apabila laut sedang pasang air laut bias setinggi lutut orang dewasa dan hal tersebut terjadi setiap hari pada saat pasang laut. Hal tersebut jelas mengganggu masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Masyarakat berharap ada bantuan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Padatnya bangunan penduduk pun menjadi penyebab terjadinya air pasang laut naik.”

Ketika di tanya mengenai RUSUNAWA, Gunawan menjelaskan :

“Sebenarnya program RUSUNAWA bukan hal yang baru bagi masyarakat pesisir. Pada saat pemerintahan yang lalu program RUSUNAWA sudah di canangkan dan sudah di sosialisasikan kepada masyarakat pesisir bahkan sudah di bangun RUSUNAWA di daerah Telukbetung Barat. RUSUNAWA itukan diperuntukan bagi masyarakat pesisir yang ingin di pindahkan oleh pemerintah. Namun pemerintah pada saat itu membebani masyarakat yang pindah ke RUSUNAWA dengan biaya sewa. Hal tersebut mendapat

penolakan dari masyarakat. Menurut mereka apabila mereka ingin di pindahkan dari tempat tinggalnya saat ini pemerintah harus mengganti atau menyediakan tempat yang layak kepada mereka secara gratis. Mereka kan di gusur tapi ko malah harus membayar uang sewa apabila tinggal di RUSUNAWA. Jelas ini memberatkan warga, belum lagi banyak dari warga yang mengeluhkan letak RUSUNAWA yang berada di daerah pedalaman sehingga sulit di jangkau kendaraan umum.”

Ketika di tanya mengenai persepsi masyarakat terhadap penataan pesisir Kota

Bandar Lampung, Gunawan menyatakan :

“Secara pribadi saya mendukung program Pemerintah Kota Bandar Lampung sebab penataan pesisir Kota Bandar Lampung saat ini sudah menjadi hal yang mendesak bagi pembangunan Kota Bandar Lampung. Dengan adanya penataan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung secara langsung akan berdampak pada perkembangan ekonomi. Setiap pembangunan pasti akan menimbulkan relokasi itu merupakan konsekuensi dari pembangunan. Mau tidak mau, suka tidak suka sebagai warga masyarakat kita harus bersedia apabila harus direlokasi karena Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan RUSUNAWA yang diperuntukan bagi masyarakat pesisir oleh sebab itu saya sebagai warga yang tinggal di kawasan pesisir harus bersedia apabila ada relokasi. Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas apabila ingin memajukan pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung. Setuap tindakan pasti ada konsekuensinya. Kebijakan pemerintah pada saat ini cenderung kearah politik, dengan tujuan politik kelompok dan tidak secara murni ingin membangun pembangunan Kota Bandar Lampung. Pembangunan akan terhambat apabila di ikuti dengan kepentingan politik. Masyarakat butuh kesejahteraan apabila Pemerintah ingin mensejahterkan masyarakat pemerintah harus berani meskipun hal itu di khawatirkan mendapat penolakan dari warga. Jangan takut kehilangan dukungan masyarakat, keberhasilan pembangunan justru akan membawa perubahan bagi masyarakat.”

4. Informan 4 (AJ/52)

Nama : Abdul Jalil, S,IKom.I

Status : Kawin

Lama Tinggal : 52 Tahun

Pekerjaan : Penghulu

Abdul Jalil, seorang penghulu Kelurahan Sukaraja berusia 52 tahun. Ia berasal dari Serang Banten. Abdul Jalil mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang bertempat tinggal di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Telukbetung Selatan.

Ketika di tanya mengenai pandangan beliau terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat pesisir, Abdul Jalil menjelaskan :

“Secara umum permasalahan yang ada pada masyarakat pesisir ialah masalah ekonomi. Banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap. Apalagi pada musim pancaroba seperti saat ini angin laut sangat berbahaya apabila sedang berlayar mencari ikan. Masyarakat nelayan di sini kebanyakan tidak berlayar apabila sedang musim pancaroba. Secara langsung hal tersebut berpengaruh pada tingkat pendapatan mereka. Pada umumnya setiap kawasan baik kawasan pesisir maupun kawasan perkotaan sekali pun memiliki permasalahan yang sama yaitu permasalahan ekonomi. Rata-rata dari masyarakat pesisir berpenghasilann kurang dari Rp.10.0000,- per hari.

Ketika di tanya mengenai RUSUNAWA, Abdul Jalil menjelaskan :

“Saat ini rusunawa yang di bangun Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah di tempati ratusan kepala keluarga, itu artinya masyarakat pesisir menyambut baik keberadaan RUSUNAWA tersebut. Namun masalahnya sosialisasi yang di lakukan pemerintah belum menyentuh kepada masyarakat pesisir secara langsung. Kami tidak mengetahui konsekuensi apabila kami bersedia di pindahkann ke RUSUNAWA. Apakah kami mendapatkan ganti rugi tanah dan banguna atau tidak. Belum lama ini Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengadakan perjanjian dengan

masyarakat pesisir yang intinya Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak akan merelokasi masyarakat pesisir. Hal tersebut tentunya di sambut baik oleh masyarakat pesisir. Terlepas dari masterplan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjadikan kawasan Pesisir Kecamatan Telukbetung Selatan sebagai tempat perdagangan dan pariwisata masyarakat belum mengetahui hal tersebut.

Ketika ditanya mengenai persepsi masyarakat dengan adanya rencana Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menata kawasan pesisir Kota Bandar Lampung,

Abdul Jalil menyatakan :

“Konsep Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menata kawasan pesisir Kota Bandar Lampung sangat baik karena bertujuan menata pembangunan daerah. Masyarakat pesisir pada umumnya mendukung program tersebut namun masyarakat menolak apabila ada rencana relokasi. Penataan ruang yang ideal menurutnya harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat setempat tidak dipinggirkan akibat kepentingan-kepentingan bisnis para elit. Keberadaan masyarakat selama puluhan tahun bukan tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Masyarakat pesisir yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan telah memenuhi kebutuhan ikan Kota Bandar Lampung selama puluhan tahun. Terlepas dari kumuhnya kawasan pesisir, pemerintah harus mengakui bahwa masyarakat pesisir telah menjadi bagian dari pembangunan pesisir Kota Bandar Lampung dan berharap Pemerintah mengikutsetakan masyarakat pesisir dalam program pembangunan tersebut. Selama ini kan Pemerintah hanya mementingkan kepentingan bisnis para pengusaha dan mengesampingkan kepentingan masyarakat pesisir. Saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung sedang menata perkampungan nelayan yang berada di Kelurahan Sukaraja. Hal tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat sebab penataan tersebut bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat.”

5. Informan 5(H/48)

Nama : Hidayatullah

Status : Kawin

Lama Tinggal : 5 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Pelindo

Hidayatullah merupakan seorang Pegawai Pelindo Lampung yang bertempat tinggal di Kelurahan Bumiwaras Kecamatan Telukbetung Selatan. Bapak 2 orang anak berusia 48 tahun ini bersuku Lampung. Sebagai masyarakat asli Lampung dan bekerja di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung tentunya Hidayatullah memahami permasalahan yang ada pada masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung.

RUSUNAWA merupakan pemukiman alternative yang di peruntukan bagi masyarakat pesisir. Ketika ditanya mengenai RUSUNAWA, Hidayatullah menjelaskan :

“RUSUNAWA di bangun untuk warga yang bersedia dipindahkan, namun banyak masyarakat pesisir menolak RUSUNAWA. Alasan mereka ialah apabila masyarakat menerima RUSUNAWA itu sama saja masyarakat bersedia di relokasi, apalagi selama ini masalah ganti rugi bangunan dan tanah belum jelas. Apabila setiap kecamatan di bangun 2 RUSUNAWA yang letaknya tidak berjauhan tentu kami setuju dengan catatan ganti rugi tanah dan bangunan yang sesuai. RUSUNAWA itu kan rumah susun sewa tentu bagi masyarakat yang bersedia pindah bermukim ke RUSUNAWA di bebani dengan biaya sewa. Pendapatan masyarakat pesisir Rp10.000,- per hari bahkan kurang, maka mungkin masyarakat dibebani dengan biaya sewa jelas ini sangat memberatkan masyarakat.”

Ketika ditanya mengenai persepsi masyarakat pesisir terhadap penataan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, Hidayatullah menjelaskan :

“Pada tahun 2008 Pemerintah mencangkan Program Pembangunan Waterfront City atau Kota Tepi Pantai. Seiring dengan bergantinya pemimpin maka berganti pula lah kebijakan Pemerintah Kota. Sebab pembangunan Waterfront City dianggap oleh Pemerintah Kota saat ini merupakan pembangunan yang tidak mungkin di lakukan. Tidak mudah bagi pemerintah untuk menata Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung dengan cara relokasi sebab di kawasan ini terdapat puluhan ribu warga masyarakat yang kehidupannya tergantung dari kawasan pesisir. Namun apabila Program Pembangunan tersebut sebatas menata pemukiman masyarakat pesisir tentu hal tersebut di sambut baik oleh masyarakat. Secara pribadi saya menganggap penataan pesisir Kota Bandar Lampung merupakan suatu program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Penataan pesisir Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan pendapatan daerah sebab di kawasan pesisir ini lah terdapat berjuta kekayaan alam yang belum secara maksimal digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung terdapat potensi pariwisata, perikanan, perkebunan sumberdaya laut yang masih belum dapat di lakukan oleh masyarakat setempat. Apabila penataan kawasan pesisir diikuti dengan rencana relokasi maka saya sebagai masyarakat pesisir yang memiliki hak kepemilikan tanah dan bangunan yang sah di keluarkan oleh BPN Kota Bandar Lampung maka saya berhak menuntut ganti rugi dan pemerintah tidak dapat sertamerta merelokasi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah tanpa adanya keputusan ganti rugi yang sesuai dengan nilai jual tanah dan bangunan yang berlaku. Pemerintah seharusnya mencanangkan program pembinaan terhadap masyarakat pesisir dalam hal pengolahan sumber daya yang terkandung di kawasan pesisir. Bukan hanya mencanangkan pembangunan saja tetapi masyarakat di arahkan untuk dapat menggali potensi kawasan pesisir. Dengan kata lain masyarakat pesisir di arahkan untuk dapat mengolah sumber daya yang ada di kawasan pesisir”

6. Informan 6 (SE/53)

Nama : Santi Enita

Status : Kawin

Lama Tinggal : 53 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Santi Enita merupakan seorang ketua pengajian yang ada di Kelurahan Garuntang Kecamatan Telukbetung Selatan. Ibu 2 orang anak berusia 53 tahun ini bersuku Padang. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan keagamaan di Kelurahan Garuntang Kecamatan Telukbetung Selatan tentu Santi memahami permasalahan pokok yang terdapat di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung. Ketika ditanya mengenai permasalahan yang di hadapi masyarakat pesisir, Santi menjelaskan :

“Banyak dari masyarakat tidak memahami permasalahan yang mereka hadapi, yang masyarakat tahu hanya bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagian besar dari masyarakat pesisir berkerja sebagai buruh, nelayan dan dagang, rata-rata pendidikan mereka hanya tamatan SLTP. Hal tersebut telah menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Permasalahan sosial-ekonomi telah menjadi permasalahan pokok masyarakat pesisir selama puluhan tahun. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan lingkungan membuat kawasan pesisir Kota Bandar Lampung menjadi kawasan kumuh. Masyarakat seakan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, padahal mereka dapat menggali potensi kekayaan yang terkandung di kawasan pesisir. Hal ini dapat di pelajari melalui pelatihan-pelatihan yang di adakan pemerintah baik tingkat Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung. Banyak

warga masyarakat yang enggan mengikuti pelatihan-pelatihan, alasan mereka tidak adanya waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut sebab mereka harus mencari nafkah.”

Ketika ditanya mengenai persepsi masyarakat pesisir terhadap penataan wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, Santi menjelaskan :

“Tujuan pemerintah untuk menata kawasan pesisir Kota Bandar Lampung mendapatkan respon positif dari masyarakat pesisir. Kami mendukung sepenuhnya program pemerintah namun kami menolak apabila kami harus di relokasi sebab kehidupan kami sangat tergantung pada kawasan pesisir, di sini lah kami hidup dan disini lah kami mati. Apa tidak ada alternatif masyarakat dilibatkan? Kami ini kan hidup turun-temurun dari laut. Kalau tidak di pesisir laut, apa bisa hidup? Nelayan tidak akan bisa hidup jauh dari laut. Saat ini pemerintah telah memperbaiki perkampungan nelayan di Kelurahan Sukaraja tentu masyarakat setempat mendukung program tersebut. Masyarakat pun memahami tujuan dari suatu pembangunan ialah untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan bertujuan meningkatkan perkembangan dan penyebaran kegiatan ekonomi masyarakat yang secara langsung berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Penataan pesisir dapat dilakukan dengan tidak merelokasi masyarakat pesisir. Selama ini yang di khawatirkan masyarakat ialah apabila ada penataan wilayah pesisir maka masyarakat terancam terelokasi, kekhawatiran tersebut beralasan sebab banyak dari masyarakat pesisir tidak memiliki sertifikat tanah. Banyak dari mereka mendirikan bangunan di zona larangan pendirian bangunan, namun hal tersebut telah dibiarkan pemerintah selama puluhan tahun. Ketidaktegasan pemerintah dalam melaksanakan peraturan telah menimbulkan penataan kawasan pesisir tidak teratur.”